SKRIPSI

PENGUSAHA DAN POLITIK ELEKTORAL

(Studi Kasus Partisipasi Politik Pengusaha Terhadap Pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. – Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh :

Bustomi Saputra

NIM : I71216038

PRODI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini.:

Nama	: Bustomi Saputra
NIM	: I71216038
Program Studi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Pengusaha dan Politik Elektoral (Studi Kasus Partisipasi Politik Pengusaha Terhadap Pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. – Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil karya dari kekayaan berfikir penulis, apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sebagai penulis bersedia memperoleh konsekuensi hukum berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, 17 Juli 2020

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
3B6EDAHF003093446
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Bustomi Saputra

NIM. I71216038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap skripsi yang di tulis oleh:

Nama : Bustomi Saputra

NIM : I71216038

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: **"PENGUSAHA DAN POLITIK ELEKTORAL: (Studi Kasus Partisipasi Politik Pengusaha Terhadap Pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa – Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. DI PILGUB JATIM 2018)''** penulis berpendapat bahwa hasil karya ilmiah tersebut sudah dapat diajukan untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 05 Juli 2020

Pembimbing

Moch. Ilyas Rolis, M.Si

NIP:197704182011011007

PENGESAHAN

Skripsi oleh Bustomi Saputra dengan Judul **"PENGUSAHA DAN POLITIK ELEKTORAL (Studi Kasus Partisipasi Politik Pengusaha Terhadap Pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si – Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018)."** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi tanggal 05 Agustus 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Moch. Ilvas Rolis, M.Si	**Dr. Abd. Chalik, M.Ag**
NIP. 197704182011011007	NIP. 197306272000031002

Penguji III	Penguji IV
Dr. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si	**M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si**
NIP. 197411102003121004	NIP. 19820210200911007

Surabaya, 05 Agustus 2020

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip. SEA, M.Phil, Ph.D

NIP.197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	**Bustomi Saputra**
NIM	:	**I71216038**
Fakultas/Jurusan	:	**FISIP/Ilmu Politik**
E-mail address	:	**sbustomi299@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGUSAHA DAN POLITIK ELEKTORAL (Studi Kasus Partisipasi Politik Pengusaha Terhadap Pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.- Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2021

Penulis

(Bustomi Saputra)

ABSTRAK

Bustomi Saputra, 2020. PENGUSAHA DAN POLITIK ELEKTORAL (Studi Kasus Partisipasi Politik Pengusaha Terhadap Pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. – Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci : Partisipasi Politik, Pengusaha, Pilkada.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi di kancah politik nasional pada tahun 2019, yang mana di tahun tersebut merupakan tahun politik yaitu pelaksanaan pemilu serentak diseluruh nusantara baik dalam pemilihan badan eksekutif hingga sampai badan legislatif mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal masing-masing kontestan politik memiliki dorongan moril dan materil yang cukup besar dari pihak pemodal dalam setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu baik ditingkat lokal maupun nasional. Sehingga membawa penulis untuk melihat lebih dalam partisipasi politik pengusaha dalam mengambil peran serta mereka pada setiap prosesi pemenangan Ibu Khofifah dan Emil di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Maka sebab itu, penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) bagaimana proses partisipasi politik pengusaha dalam pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc di pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, (2) apa alasan pengusaha terlibat dalam proses pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc di pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan teori yaitu teori partisipasi politik Milbart dan Goel dan teori rent seeking Gordon Tullock.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pengusaha dan penguasa elite politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap proses politik baik berperan sebagai kontestan politik maupun berperan sebagai tim pemenangan pemilu, seorang pengusaha akan tetap mengambil perannya masing-masing sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki untuk berproses dalam dunia politik khususnya di Pilkada Jatim 2018, hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap kebijakan politik yang berkaitan dengan dunia usaha dapat memberikan keuntungan besar bagi usaha yang mereka geluti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Bustomi Saputra, 2020. BUSINESS AND ELECTORAL POLITICS (Case Study of the Participation Businessman to Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si- Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc In The Election Governos of Java 2018). Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Political Participation, Entrepeneur, Regional Elections.

This research originated from the author's interest in seeing the phenomena that occurred in the national political in 2019, which in that year was a political year, namely the implementation of elections simultaneously throughout the archipelago both in elections for the executive body to the legislative body starts from the national level to the local level each political contestant has considerable moral and materian encouragement from the investors in every process of implementing the election, both at the local and national levels. Thus bringing the author to take a deeper look at the political participation of entrepreneurs in taking their participation in every procession of winning Mrs. Khofifah and Emil Dardak in the election for Governor of East Java in 2018. Then because that, the author uses two problem formulations in this study as follows: (1) How is the process of political participation of entrepeneurs in winning Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si and Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc in the election for Governor of East Java in 2018? (2) What are the reasons for entrepeneurs involved in the winning process Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si and Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc in the election for Governor of East Java in 2018? To be able to answer the problem formulation the writer uses descriptive qualitative methods. In this study, the authors used data collection teach techniques in the form of observation, interviewes, and documentation. And for the theory used in the study the writer uses two theoretical approaches, namely Milbart and Goel's theory of political participation and Gordon Tullock's theory of rent seeking.

The results of this study indicate that the political participation of entrepeneurs and political elite rulers are two things that can't be separated in any political process, either acting as a political contestant or acting as an election winning still take team, an entrepreneur will still take on their respective roles according to the resources they have. Have to process in the political world, especially in the 2018 East Java regional elections, this is done with the aim that any political policy related to the business world can provide great benefits or the businesses they are in.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI i

PERSETUJUAN PEMBINMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR BAGAN x

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 16
- **C. Tujuan Penelitian** 16
- **D. Manfaat Penelitian** 17
- **E. Definisi Konseptual** 18
  - 1. Partisipasi Pengusaha 18
  - 2. Pemilihan Kepala Daerah 19

BAB III KAJIAN TEORITIK 23

- **A. Penelitian Terdahulu** 23
- **B. Kerangka Konseptual** 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teori Rente dan Pemburu Rente 33

1. Rent Seeking Gordon Tullock……..35

2. Rent Seeking Michale Ross 38

b. Teori Partisipasi Politik 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 47

A. Pendekatan Penelitian 47

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 48

C. Informan Penelitian.....49

D. Teknik Pengumpulan Data.....57

E. Teknik Analisis Data.....59

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....61

G. Sistematika Pembahasan 62

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA 64

A. Setting Penelitian.....64

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur.....64

2. Pengusaha, Uang, dan Elite Politik 71

a. Pengusaha.....71

b. Uang 72

c. Elite Politik 73

B. Penyajian dan Analisis Data 75

1. Partisipasi Politik Pengusaha Dalam Proses Pilkada di Provinsi Jawa Timur 2018.....77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Pendorong Keterlibatan Pengusaha Dalam Proses Pemenangan Ibu Khofifah dan Emil Dardak di Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 91

a. Welfare Cost.....96

b. Transfer Cost.....97

c. Competing Rents.....99

BAB V PENUTUP……106

1. Kesimpulan……106

2. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA……...108

LAMPIRAN……..119

1. Pedoman Wawancara ……..119

2. Dokumentasi Penelitian ……...120

3. Sertifikat Turnitin ……122

4. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ……123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan 51

Tabel 1.2 Laporan Sumbangan Dana Kampanye 98

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Piramida Partisipasi Politik Milbrath dan Goel 44

Bagan 2.2 Piramida Partisipasi Politik III Menurut David F Roth dan Frank L. Wilson 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Pembagian Administrasi Provinsi Jawa Tim 64

Gambar 3.2 Data Sebaran Wilayah Provinsi Jawa Timur 65

Gambar 3.3 Jumlah Proyeksi Penduduk Dari Tahun 2010-2020 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur 67

Gambar 3.4 Data Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2019 dan Data Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 69

Gambar 3.5 Data Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan pengusaha dan politik bukan hal baru untuk menjadi bahan perbincangan publik di Indonesia khususnya di tingkat lokal. Hubungan ini terjadi ketika salah satu kontestan politik kurang memiliki finansial atau pendanaan yang cukup memadai dalam proses kampanye, sehingga memaksa para kontestan politik untuk mencari finansial tambahan kepada para pengusaha-pengusaha swasta agar dalam proses kampanye yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diinginkan. Tetapi dalam proses ini pengusaha tidak berhenti sampai disini saja, melainkan para pengusaha juga akan memberikan sedikit sebuah tekanan kepada para kontestan politik yang sudah dibantu. Maka ketika salah seorang kontestan politik yang mereka bantu berhasil menduduki puncak kekuasaan baik dalam tingkat nasional maupun lokal, disitulah para pengusaha mengambil sebuah keuntungan bagi perusahannya yakni dengan mempengaruhi para elite politik untuk membuat sebuah kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahannya.

Hal seperti itu berawal ketika praktik kekuasaan pada masa Orde Baru terdengar dalam puncak kekuasaan di Indonesia.Ini yang merupakan salah satu penyebab para pengusaha semakin meluas dalam mengusahai jejaring politik di Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintahan pada masa Orde Baru dihadapkan pada problem kekurangan modal, sehingga pemerintah memberikan peluang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar bagi pengusaha swasta yaitu berupa kepercayaan bekerjasama dengan pemerintah.[1] Dan karena peristiwa itulah menyebabkan pengaruh besar terhadap struktur ekonomi dan politik di Indonesia, karena hal ini telah didominasi oleh para elite-elite politik Orde Baru dan Kroni-Kroni bisnisnya Soeharto. Menurut Yahya Muhaimin, pengusaha yang dibesarkan dalam lingkungan Soeharto sudah menjadi patronase dibidang ekonomi dan politik yang telah mendapatkan fasilitas-fasilitas negara yaitu berupa proteksi, kebijakan, lisensi dan monopoli. Maka sebab itu, elite politik pada masa Orde Baru atau orang-orang yang ada didalam lingkaran birokrasi juga bersama-sama ikut andil mengambil posisi untuk saling mempertukarkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan saling menguntungkan satu sama lain. Disinilah muncul sebab-akibat antara institusi kekuasaan dan regulasi dijadikan sebagai alat persekongkolan pengusaha dan penguasa dengan berlindung diatas naungan institusi negara dan lembaga-lembaga demokrasi lain seperti partai politik.[2]

Situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya pada era Orde Baru menciptakan sebuah sistem baru yang lebih sentralistik. Hal ini terlihat ketika Partai Masyumi, PSI, dan Murba pada tahun 1959-1964 ditiadakan oleh penguasa Orba, sedangkan Partai PKI dibubarkan pada tahun 1965, kericuhan-kericuhan yang dibentuk oleh perbedaan ideologi mengalami penurunana yang sangat signifikan ketika kekuatan ABRI didorong oleh birokrasi menjadi

[1] Muhammad Ali Azhar, "Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha Jadi Pengusaha" Jurnal Publica 02 No. 01 (2012): 43

[2] M. Uhaib As'ad, "Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik: Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam PILKADA Di Kalimantan Selatan" Jurnal As Siyasah 01. No. 01 (2016), FISIP: Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin, uhaibn@yahoo.com, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan utama dalam sistem politik Orde Baru. Melalui Golongan Karya (Golkar) ABRI dan birokrasi melakukan kolusi dengan memanfaatkan organisasi tersebut sebagai wadah politik untuk menghimpun kelompok masyarakat dalam mendapatkan legitimasi melalui pemilu kedua pada tahun 1971 sebagai alat untuk mengendalikan sistem politik baik dalam tingkat nasional hingga sampai ketingkat lokal[3]. Pada tahun 1971 Golkar berhasil meraih suara sekitar 63% dari keseluruhan jumlah total suara sah 100%, ini disebabkan karena Golkar disokong oleh kekuatan birokrasi dan militer serta pengusaha-pengusaha besar sebagai bagian dari kader dan pemimpin tersebut. Dengan demikian partai Golkar menjadi salah satu partai pemenang mutlak dalam perhelatan pemilu, karena telah berhasil menguasai 73,04% kursi di lemabaga keterwakilan yang berisi dari kalangan birokrat sipil, militer, dan pensiunan dari kedua lembaga tersebut.[4] Maka sebab itu dengan sendirinya, Golkar akan terus melakukan segala hal cara untuk tetap menjadi salah satu pemenang dalam setiap perhelatan pemilu yakni dibawah tekanan pimpinan pusat sebagai salah satu ciri dari sistem pemerintahan sentralistik atau otoritarianisme.[5]

Membahas soal pehelatan pemilu di tahun 1971-1997 merupakan perhelatan pemilu pertama dimasa Orde Baru yang mana telah diikuti oleh 10 organisasi sebagai peserta pemilu, salah satunya ialah Golkar yang merupakan

[3] Purwoko., "Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi", Jurnal Ilmu Politik 1 No. 01 April 2010: 107
[4] Arbi Sanit., *Partai, Pemilu, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 50-51
[5] Eva Etzioni & Halevy, *Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik* (Yogyakarta: Asram Foundation, 2011), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisai politik pemerintah yang menghimpun kekuasaan hingga sampai ditingkat birokrasi dan militer. Hal ini juga didorong oleh terbentuknya peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang partai politik, dan Golkar, serta kebijakan lainnya. Dalam konsep ini membahas soal larangan bagi partai politik sebagai peserta pemilu dalam beroperasi ditingkat desa, sebab didalam peraturan ini partai politik yang merupakan bagian dari peserta pemilu hanya diberikan kesempatan beroperasi sampai ditingkat kecamatan. Sedangkan Golkar bebas beroperasi dimanapun sebab didalam aturan tersebut Golkar merupakan orgnisasi politik, sehigga apabila Golkar melakukan operasi ditingkat desa maka dapat dimaklumi. Dari sinilah cikal bakal kemenangan Golkar sebagai salah satu organisasi politik yang menjadi kemenangan tunggal dalam pemilihan tahun 1971-1997 di era Orde Baru dengan didukung oleh kekuatan militer, birokrasi, organisasi masa, dan pengusaha-pengusaha swasta.[6]

Sumber kedua setelah kekuatan militer dan birokrasi dalam pemenangan Golkar setiap pemilihan, serta berkuasanya Presiden Soeharto pada masa Orde Baru disokong oleh kekuatan pengusaha-pengusaha swasta dan pengusaha asing untuk bersama-sama membangun perekonomian Indonesia dalam bidang pembangunan, sebab pada era Orde Baru pembangunan merupakan tonggak utama dalam perwujudan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Hal ini berawal ketika Soeharto mengajak para pakar ekonomi sipil dari Universitas Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum tenokrat yang memiliki

[6] Noviah Iffatun Nisa, Mohammad Na'im, & Nurul Umamah., "Strategy Of Golongan Karya To Be Winner In Election Year 1971-1997" *History Education* Program Jember *University*. Jurnal *Historica* 1, No. 01 2017: 144-145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan bahwa salah satu pendorong untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan dibidang industry menjadi sangat perlu sebagai langkah untuk mendorong seluruh gerbong pembangunan ekonomi.[7] Oleh sebab itu, pemerintahan Orde Baru melibatkan pengusaha-pengusaha asing seperti IMF, Bank Dunia, dan investor-investor lainnya untuk dilibatkan dalam keseimbangan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.[8] Selain itu, pemerintah Orde Baru juga melibatkan pengusaha disektor swasta yakni pengusaha yang berada di dalam negeri yang juga banyak terlibat aktif didalam setiap program kebijakan pembangunan pemerintah. Selain dilibatkan dalam sektor pembangunan pengusaha-pengusaha pada era Orde Baru juga terlibat aktif didalam dunuia politik dengan menjadi bagian dari pimpinan atau kader dari Golkar yang saat itu merupakan salah satu organisasi politik yang berhasil mengusahi sektor pemerintahan.

Peristiwa ini tidak bertahan lama ketika mundurnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang merupakan salah satu momentum bagi perubahan politik secara mendasar di Indonesia. Dari adanya transisi politik menyertai membuka proses perubahan dari rezim otoritarian kearah yang lebih demokratis. Di era transisi inilah harapan publik terhadap lahirnya sistem baru dan tatanan politik yang seimbang menjadi dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik. Pada era Orde Baru berbagai kalangan mendesak para elite politik

---

[7] Beby Masitho., "Dinamika Politik Pembangunan Pada Masa Orde Baru: Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peran Modal Jepang", Universitas Medan Area, Jl. Kolam No. 01 Medan Estate, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL, Email: politikbeby@yahoo.co.id., Jurnal Perspektif 6, No. 2 Oktober 2013: 119

[8] Syamsul Ma'arif., "Kegagalan Privatisasi BUMN Di Era Orde Baru", Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP UNILA, Jurnal Administrasi Publik 9, No. 01 2018:. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mampu meletakkan sistem politik yang lebih demokratis agar segera diwujudkan dalam agenda reformasi.[9] Karena di era Orde Baru publik melihat semakin banyaknya praktik Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) yang tidak hanya melibatkan para elite politik pemerintahan, tetapi juga melibatkan para aktor ekonomi yang memiliki sumber daya besar sebagai patner dari pemerintah untuk menciptakan praktik-praktik tersebut.

Ditengah situasi itu, pemerintahan Soeharto mengalami kegalauan yang sangat luar biasa, terutama ketika beberapa menteri seperti Ginandjar Kartasasmita dan 13 menteri lainnya memutuskan untuk tidak bersedia lagi ditunjuk menjadi menteri dikabinet baru. Hal ini mempersulit posisi politik Soeharto untuk tetap mempertahankan kepentingannya di era selanjutnya. Karena merasa posisinya semakin sulit dan krisis dukungan dari para kroni-kroninya, akhirnya presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari tonggak kekuasaannya.[10] Ini yang disebut oleh Ian Douglas Wilson didalam bukunya *"Politik Jatah Preman"* yang mengatakan bahwa:

> *"apa yang sudah terjadi di Indonesia telah terdokumentasi dengan baik dimana preman dan geng preman kerap tampil sebagai penerima manfaat utama dari politik electoral demokratis baik sebagai kandidat, pendongkrak penghasilan, maupun makelar kekuasaan yang mampu menggerakkan*

[9] Idrus Marham, *Ironi Demokrasi Setengah Hati: Studi Kasus Kontestasi Elite Politik Di DPR RI 1999-2004* (Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati, 2016), 29
[10] Ibid., 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan, mengancam pesaing dan menjalankan fungsi-fungsi lain atas nama klien".[11]

Belajar dari gagalnya sistem ekonomi dan politik di era Orde Baru, maka lahirlah pemerintahan baru di era reformasi dengan melaksanakan berbagai perubahan secara intitusional. Perubahan yang signifikan di era reformasi terlihat adanya kelembagaan yang berjalan lebih demokratis dengan adanya sistem otonomi daerah yang bersifat desentralisasi dimana telah menciptakan produk hukum baru terkait dengan Pengelolaan pemerintah daerah yang mana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa sistem pemerintahan telah memberikan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki beberapa hak diantaranya sebagai berikut *Pertama,* mengatur dan mengelola segala urusan pemerintahan daerah secara mandiri, *Kedua,* memilih pemimpin, *Ketiga,* mengelola aparatur daerah, *Keempat,* mengelola sumber daya daerah secara mandiri, *Kelima,* memungut pajak dan retribusi daerah, *Keenam,* memperoleh hasil dari pengelolaan sumber daya yang berada di daerah, *Ketujuh,* memperoleh sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang sudah ditetapkan didalam perundang-

[11] Ian Douglas Wilson., *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan Di Indonesia Pasca Orde Baru*, Di Terjemahkan Dari Bahasa Inggris Oleh Mirza Jaka Suryana, (Tanggerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2018), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan.[12] Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya menggunakan prinsip-prinsip demokrasi sebagai dasar untuk meningkatan peran serta masyarakat, dan mewujudkan pemerataan keadilan sosial dengan memperhitungkan berbagai aspek-aspek penting yang berkenaan dengan keanekaragaman antar daerah. Ini karena pelaksanaan otonomi daerah dianggap sangat penting dilakukan, sebab menjadi tantangan baru bagi perkembangan pemerintahan baik ditingkat lokal, nasional, dan regional, dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan sebagai pondasi dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara nasional. Sebab berbicara soal kewarganegaraan tidak hanya soal produk hukum saja, tetapi juga berbicara soal hak dan kewajibanya, serta menyangkut dengan persoalan-persoalan baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.[13]

Oleh sebab itu, otonomi daerah yang terkandung didalam sistem desntralisasi dapat memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah secara leluasa untuk mengelola segala problem-problem daerah, dan sistem desentralisasi juga dapat lebih cepat menjawab segala fenomena-fenomena dalam kehidupan warga Negara untuk diimplementasikan dalam bentuk kebijakan daerah. Sedangkan pengusaha adalah aktor yang memiliki sumber daya yang kuat untuk mengendalikan, dan mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah. Kajian yang dilakukan Goss menunjukkan bahwa adanya kontestasi dalam perebutan kekuasaan, dan prosedur pembuatan kebijakan

[12] H. Abd. Halim, *Politik Lokal: Aktor Problem, dan Konflik Dalam Arus Demokratisasi* (Malang : Intrans Publishing, 2018), 12
[13] Mona Lohanda, Parsudi Suparlan, DKK., *Antara Prasangka dan Realita: Telaah Kritis Wacana Anti China Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Inspirasi, 2002), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menjadi bagian dari roda pemerintahan untuk melakukan kerjasama dan koordinasi sebagai bagian dari wujud dalam menciptakan kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan budaya baik secara nasional maupun ditingkat lokal. Ini yang menyebabkan para elite politik banyak bergantung pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bonafit yang cukup besar untuk mewujudkan kepentingannya dalam mendapatkan kekuasaan baik dibidang eksekutif, legislative dan yudikatif, serta lembaga-lembaga politik lainnya. Sedangkan penyebab ketergantungan pengusaha pada pemerintah yakni hanya untuk mendapatkan legalitas, retribusi dan profit bagi perusahaan yang mereka kelola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan aktor-aktor privat semacam pengusaha dan para elit politik saling menjalin interaksi satu sama lain dalam jaringan yang sama.[14]

Maka sebab itu, pengusaha adalah *oligarch* yaitu seseorang yang memiliki sumber daya yang kuat untuk mempertahankan segala kekayaannya dengan beragam cara. Dan seseorang tersebut akan menguasahi, serta mengendalikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kekayaan pribadinya sebagai pondasi dasar untuk mempertahankan jabatan sosial yang dimilikinya. Hal ini dapat diidentifikasi dalam dua tahapan yang *Pertama*, dari sisi politik, para pengusaha menggunakan jaringan elite politik sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara mereka. *Kedua*, dari sisi ekonomi politik, pengusaha sebagai relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya

[14] Priyanto Harsono, "Bisnis Sebagai Kekuatan Politik: Kajian Pengembangan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengembangan Industri Pariwisata (2005-2012)" Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan1, No. 02 (9) 2015, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi pada segilintir pihak, dalam konteks ini yaitu para pengusaha dan elite politik sama-sama memiliki hubungan timbal balik dan memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kekayaan pribadi.[15]

Pada proses praktik diatas semakin besar berawal sejak berakhirnya kekuasaan di era Orde Baru dan lahirnya transisi kekuasaan Orde Reformasi telah banyak melahirkan transisi politik yakni dari sistem otoriter ke dalam sistem yang lebih demokratis. Hal ini diiringi dengan berbagai perubahan-perubahan politik pada institusi-institusi kekuasaan dan lembaga demokrasi telah memberikan ruang secara bebas bagi publik untuk mengimplementasikan kepentingan politiknya secara rasional dan bebas. Seperti diketahui bahwa pada masa Orde Baru ruang demokrasi yang diciptakan menjadi lebih sempit bagi warga Negara, ini karena terlalu banyak kontrol yang dilakukan oleh institusi Negara, sehingga harus merampas segala hak politik warga untuk berekspresi secara terbuka didepan publik.[16]

Selain itu, didalam konstitusi UUD 1945 tidak hanya membahas soal sistem desentralisasi atau otonomi sebagai salah satu wujud demokrasi, melainkan juga membahas tentang konsep demokrasi ekonomi yang berdasarkan asas kerakyatan, yaitu segala kegiatan ekonomi dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan sepenuhnya di manfaatkan sebesar-besarnya untuk

---

[15] Vellayati Hajad, *"Oligark Sebagai Rent Seeker: Haruskah?"*, Jurnal Public Policy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Vellayati.Hajad@gmail.com.,3 No. 01 Tahun 2017, 28

[16] M. Uhaib As'ad., *"Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik: Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam PILKADA Di Kalimantan Selatan"* Jurnal As Siyasah, FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin, uhaibn@yahoo.com, 1, No. 01, Tahun 2016, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan rakyat.[17] Akan tetapi dalam konteks demokrasi ekonomi tidak jauh berbeda dengan konteks dimasa Orde Baru. Walaupun secara politik di era Reformasi mengalami perubahan, seperti dapat diketahui bahwa di era Orde Baru sistem politik lebih sentralistik, tetapi di era reformasi sistem politik berubah menjadi desentralisasi dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk bersama-sama mengelola segala sumber daya yang ada dimanafaatkan dalam wujud kesejahteraan sosial secara merata. Sedangkan di dalam sektor ekonomi baik di era Orde Baru hingga sampai di era Reformasi tetap saja tidak mengalami perebuhan dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa kebijakan berikut. *Pertama,* pencabutan atau pengurangan subsidi pada bagian penting seperti subsidi BBM, tarif dasar listrik, dan harga pokok pertanian. *Kedua,* pembangunan ekonomi yang berbasis pertumbuhan masih terus berjalan hingga sampai saat ini memberikan dampak besar bagi investasi asing yang kurang terkendali, dan menimbulkan banyak problem di Instansi BUMN maupun BUMD, sehingga beberapa perusahaan baik milik negara maupun daerah masih banyak dikuasi oleh pihak asing. *Ketiga,* industri kecil dan rumah tangga, seperti usaha kerajinan umumnya yang dimiliki oleh pribumi. Sedangkan industri menengah dan distribusi banyak dikuasi oleh pengusaha yang kuat yang terdiri dari non pribumi. Dan untuk industri besar lainnya pada umumnya masih dikuasi oleh pengusaha asing melalui multinasional corporation.[18]

---

[17] Syuf'at., "Demokrasi Ekonomi Di Indonesia Era Reformasi", Dosen Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Jurnal el-JIZYA 2, No. 01 Januari-Juni 2014, 185
[18] Ibid., 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, ketika runtuhnya Soeharto di era Orde Baru tidak serta merta menjatuhkan seluruh kroni-kroni soeharto didalamnya, melainkan ketika pasca runtuhnya Orde Baru sejumlah kolega lama Soeharto masih banyak mengamankan berbagai posisi strategis di dalam sektor pemerintahan di era reformasi, kemudian untuk rekan-rekan bisnis Soeharto masih banyak berperan dalam menentukan proses pemulihan ekonomi Indonesia dengan menduduki di sektor-sektor politik hingga sampai di sektor-sektor ekonomi yang lebih kompleks termasuk menjadikan seluruh perusahaannya didalam sektor pemerintahan di era reformasi. Dengan demikian hingga sampai saat ini pengusaha-pengusaha masih tetap eksis dan banyak yang berhasil menduduki sektor strategis di pemerintahan Indonesia.[19]

Maka sebab itu, pengusaha dan para elit poltik lokal dalam setiap perhelatan pemilu selalu memiliki sebuah pola dan hubungan yang sama dalam melaksanakan aktivitas politik di Negara demokrasi di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan tumbuhnya budaya politik lokal seperti perilaku money politik, dan mahalnya biaya politik*(Political Cost)* yang dikeluarkan oleh setiap kontestan pemilu menyebabkan para pengusaha mencari jalan untuk menjalankan prosesi bisnisnya tidak lain yakni untuk menambah profit perusahaannya secara material, legalitas, dan kekuasaan di ranah pemerintahan.Selain itu para elit politik lokal yang ikut serta dalam kontestan pemilu juga mencari jalan mudah yakni dengan melibatkan pengusaha swasta

[19] Kacung Marijan., *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010): 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharapkan dapat membantu pendanaan kampanye baik dalam bentuk barang, jasa maupun material untuk memenangkan kontetasi pemilu. Maka dalam hal ini jangan salah ketika melihat keterlibatan pengusaha dalam dunia politik baik dalam kontestasi pemilihan di tingkat lokal hingga sampai kontestasi pemilihan di tingkat nasional. Peristiwa seperti ini yang disebut oleh Yahya A. Muhaimin yakni sebagai sebuah peristiwa *client-businessmen* yaitu pengusaha – pengusaha swasta pribumi yang beroperasi dibawah dukungan dan proteksi jaringan kekuasaan para elite politik di pemerintahan.[20]

Ketika menjalankan aktivitas politik para pengusaha dan elit politik di pemerintahan selalu memiliki hubungan timbal balik diantara keduanya. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian pengusaha memiliki patron dalam kelompok politik hingga sampai dibidang birokrasi. dan pengusaha sangat bergantung pada konsesi, serta monopoli yang diberikan oleh pemerintah.[21] Salah satu keterlibatannya yakni dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan politik harus menjujung tinggi kegiatan bisnis yang ada di sebuah Negara. Dan sebaliknya hal yang sama juga terjadi dengan urusan bisnis harus dapat selalu mendukung setiap kegiatan politik untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Maka dalam hal ini jangan salah ketika melihat pelaku bisnis memiliki kedekatan dengan dunia politik tidak hanya sebagai partisipan politik saja, tetapi beberapa diantaranya juga merupakan bagian dari salah satu kontestan politik yang mempunyai modal kuat sehingga dikenal oleh masyarakat luas.

[20] Yahya A. Muhaimin, "Hubungan Penguasa-Pengusaha: Dimensi Politik Ekonomi Pengusaha Klien Di Indonesia"Jurnal KELOLA, No. 10/IV/1995, 18
[21] Ibid.,18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi politik seorang pengusaha di dunia politik terlihat ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada), maupun dalam pemilihan badan eksekutif hingga sampai pemilihan badan legislatif baik dalam tingkat lokal sampai dalam tingkat nasional. Mereka sadar bahwa peran elite politik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membuat sebuah kebijakan publik, yang mana setiap kebijakan itu membawa sebuah pengaruh besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia.

Dalam hal ini secara realitas pengusaha lebih cenderung tercukupi secara material. Sehingga pada saat pengusaha mulai masuk dalam dunia politik selalu mendapatkan sambutan hangat ditengah-tengah masyarakat yang kental dengan budaya politik yaitu terkait kampanye hitam yakni menggunakan uang sebagai salah satu strategi untuk memobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Dan hal seperti ini sampai sekarang masih menjadi budaya politik di masyarakat khususnya Provinsi Jawa Timur. Peristiwa seperti inilah yang mengundang para pengusaha untuk terjun dalam dunia politik. Hal seperti ini terus terulang disaat perhelatan pemilu baik dalam pemilihan legislative, dan eksekutif sekalipun seringkali melibatkan pengusaha swasta untuk memenangkan kontestasi politik.

Maka sebab itu, peristiwa seperti ini sudah bukan peristiwa yang tabu di Provinsi Jawa Timur, sebab peristitiwa ini juga terjadi pada tahun 2018 yang lalu dimana masyarakat Provinsi Jawa Timur merayakan Pesta Demokrasi secara serentak yakni dalam pemilihan Kepala Daera Provinsi Jawa Timur. Hal ini muncul dua calon Kepala Daerah salah satu diantaranya merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petahana Wakil Gubernur Jatim yang bernama Saifullah Yusuf dari periode 2008-2013 dan periode 2013-2018. Dan pada pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018 beliau mencalonkan kembali sebagai Calon Gubernur di dampingi oleh Calon Wakil Gubernur yang bernama Puti Guntur Soekarno Putri pada priode 2018-2023 dan lawan politik dari beliau ialah bernama Ibu Khofifah Indar Parawansa, Sebagai calon gubernur dan didampingi oleh calon wakil gubernur Emil Elistianto Dardak yang merupakan tokoh politik di Kabupaten Trenggalek. Dari dua calon tersebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan para pengusaha-pengusaha swasta yang siap membantu dalam pemenengan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga berdasarkan pemaparan informasi tersebut diatas menjadi ketertarikan penulis untuk menganalisa lebih lanjut dan menjadikannya sebuah objek karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pengusaha dan Politik Elektoral: Studi Kasus Partisipasi Politik Pengusaha Terhadap Pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. - Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018."**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kajian dan hasil pemaparan di atas, maka penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana proses partisipasi politik pengusaha dalam pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc di Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ?
2. Apa alasan pengusaha terlibat dalam proses pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc di Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebuah karya ilmiah sudah tentu saya sebagai penulis memiliki tujuan agar dari hasil karya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademika muda sebagai berikut.:

1. Sebagai dasar untuk mengetahui prosesi partisipasi politik pengusaha dalam pemenangan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak di Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur (Pilgub Jatim) pada Tahun 2018.
2. Dan untuk mengetahui motif dari partisipasi politik pengusaha dalam proses pemenangan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak di Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur (Pilgub Jatim) pada Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   a. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan, informasi, serta menambah kepustakaan bagi akademika muda tertutama yang berkaitan dengan proses dan motif partisipasi politik pengusaha dalam politi.

2. Manfaat Praktis

   a. Manfaat bagi mahasiswa

      Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi kalangan akademika muda khususnya dalam hal mengidentifikasi partisipasi pengusaha dalam pemilihan di tingkat lokal.

   a. Bagi Penulis

      Selanjutnya bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus memperkuat analisa mengenai partisipasi pengusaha dalam pemilihan di tingkat lokal. Sehingga mampu untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran kalimat dari judul karya ilmiah ini, maka penulis memberikan sedikit pemahaman bagi pembaca yakni dengan menjelaskan istilah-istilah didalamnya sebagai berikut.:

1. partisipasi pengusaha

   Partisipasi pengusaha adalah *oligarch* yaitu merupakan seseorang yang ikut serta didalam setiap kegiatan politik maupun bisnis untuk mempertahankan segala kekayaannya dengan berbagai strategi, serta mengendalikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi sebagai alat untuk proteksi keamanan bagi jabatan sosial yang dimiliki.[22] Oleh karena itu, perilaku pengusaha dalam mengambil sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya selalu memakai akal rasional dan egoisme sebagai salah satu sifat yang dimiliki manusia pada umumnya. Dengan sifat seperti ini membuat manusia akan terus bersikap secara rasional agar dapat mewujudkan segala kepentingan yang mereka miliki. Menurut Thomas Hobbes sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti di dalam bukunya yang berjudul *"Memahami Ilmu Politik"* mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu egoism yang tinggi dan memiliki sifat rasional. Oleh sebab itu, sifat rasional ini yang memungkinkan manusia saling memiliki perbedaan pendapat dalam berekspresi, dan sifat ini

[22] Vellayati Hajad, "Oligark Sebagai Rent Seeker: Haruskah?", Op.Cit., 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula yang menyebabkan manusia mampu membedakan antara kepentingan dirinya secara pribadi dengan kepentingan bersama.[23] Maka dari itu sifat rasional yang dimiliki manusia lebih cendrung mengarah terhadap timbunya konflik daripada keharmonisan. Sehingga pada intinya manusia akan lebih bersikap rasional dan egois untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan memanfaatkan situasi, institusi-institusi, lembaga-lembaga negara dan kemampuan yang dimiliki dengan keterbatasan yang ada untuk mencapai tujuan mereka.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bentuk implementatif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Dengan memberikan hak pilihnya mereka memilih dan menentukan pemimpinnya dengan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Sedangkan nilai dasar dari pilkada masuk dalam kategorikan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat lokal. Hal seperti ini dapat dilihat dari beberapa kesamaan dalam asas-asas yang digunakan oleh penyelenggara pemilu baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Dengan demikian pemerintahan daerah yang terpilih berdasarkan pemilu yang demokratis adalah pemerintah yang dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat.[24]

---

[23] Ramlan Surbakti, *Mehami Ilmu Politik* (Jakarta : PT Grasindo, 2010), 32

[24] Erifan Manulang, "Parameter Pemilu Demokratik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017: Tinjauan Aspek Persaingan Yang Bebas dan Adil.", Jurnal Bawaslu, Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, KPU Kabupaten karo, Sumatera Utara, erifanmanullang@yahoo.com, emanullang@gmail.com 3, No. 03 Tahun 2017, 378-379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsip dasar pemilihan kepala daerah telah diatur didalam ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Walaupun secara esensial didalam batang tubuh UUD 1945 tersebut tidak mengenal secara istilah tentang kepala pemerintahan daerah, namun secara istilah Pemilihan kepala daerah sebagaimana dinyatakan diatas masih mengandung sebuah prinsip yang terletak dalam isi dari UUD 1945 yakni pada kalimat "dipilih secara demokratis". Dari isi penggalan kalimat inilah bermakna bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung ialah bermakna bahwa setiap warga negara secara langsung memilih Gubernur beserta wakilnya, Bupati atau walikota beserta wakilnya secara langsung. Sedangkan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara tidak langsung bermakna bahwa setiap warga negara dalam menentukan Gubernur beserta wakilnya, dan Bupati/Walikota beserta wakilnya dipilih melalui proses tidak langsung yakni melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[25]

Peraturan mengenai pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, kemudian daripada itu dilanjut di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

[25] Arifudin, "Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kedaulatan Rakyat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017."*Jurnal Bawaslu*,Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Volume. 03 Nomor 03 Tahun 2017, 396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.[26] Yang mana dijelaskan di dalam pasal 2 menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara berpasangan melalui pemilihan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (luber juldil). Adapun penjabaran mengenai asas luber juldil ialah sebagai berikut asas langsung dapat diartikan bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.[27] Namun ada beberapa hal dalam pemilihan kepala daerah yang dalam prosesnya berbeda dengan daerah lainnya seperti misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mana dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurnya tidak dipilih secara langsung melainkan melalui proses secara garis keturunan raja, juga termasuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dimana Walikota dan Bupatinya tidak dipilih secara langsung oleh warga DKI Jakarta tetapi prosesnya termasuk dalam kategori khusus atau istimewa, dimana secara normatif sudah diatur didalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *"...Negara mengakui dan menghormati satuan-*

[26] Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
[27] Ibid., 397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.".[28]

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terdapat beberapa prinsip lainnya yang juga patut untuk di implementasikan. Prinsip tersebut diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.[29] Adapun prinsip tersebut ialah *"…Pertama, pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses uji public.".*[30]

[28] Undang-Undang Dasar (UUD) 1945., Pasal 18B Ayat (1)

[29] Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[30] Arifudin, "Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kedaulatan Rakyat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017.", Op.Cit, 397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari dari penelitian yang sama dalam satu obyek, maka dalam hal ini penulis akan mengkaji karya lainnya yang membahas permasalahan yang sama. Penulis melakukan sebuah telaah pustaka diantaranya ialah menelaah masalah apa yang diangkat, teori dan metode penelitian yang digunakan serta hasil penelitian yang ditemukan. Penulis juga akan memberikan beberapa tanggapan terkait dengan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

Pertama, Fajar Kuala Nugraha *Journal Of Governance and Policy,* Volume 01 Nomor 02 Tahun 2014 dengan judul Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur Tahun 2013. Rumusan masalah dalam objek penelitian ini yaitu bagaimana calon perseorangan yang sekaligus juga oligarki mampu memenangkan pemilukada di Lombok Timur pada tahun 2013, dan motif dalam perluasan dan pertahanan kekayaan yang dimiliki. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Oligarki Jeffrey A. Winters. Hasil dari penelian ini adalah telah diketahui bahwa ada dua kekuatan besar yang membantu calon perseorang tersebut berhasil menduduki tonggak kekuasaan politik di Lombok Timur salah satunya ialah memiliki sumber daya material yang cukup besar untuk memobilisasi massa dan bahkan dari kekuasaan sumber daya tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa pasangan Ali BD, dan Alkhaer didalam pemilukada di Lombok Timur. Dari hasil sumber daya material yang dimiliki oleh dua pasangan calon Ali BD, dan Alkhaer dikarenakan dua sosok calon ini juga merupakan pengusaha paling berpengaruh di Lombok Timur. Ini dikarenakan sosok Ali BD memiliki jaringan bisnis yang kuat diantaranya ialah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR Bima Abdi Swadaya (BIAS), BPR Qirad, PT Genta Bumi Selaparang (GBS), PT. Nusa Internasional, Aken Life, Koperasi Samsambo (Sasak, Samawa, Mbojo). Sedangkan Alkhaer didapatkan atas dasar beliau merupakan salah satu distributor utama persebaran pupuk di Lombok Timur bahkan dikepulauan Lombok dan Sumbawa.Dan bahkan pimpinan perusahaan PT. Petrokimia Gresik juga telah menjadi rekan bisnis beliau sejak tahun 1998 dan terus mengalami perkembangan hingga sampai saat ini. Selain itu beliau juga memiliki usaha SPBU yang letaknya dipusat kota yang sangat strategis. Dari sinilah dua kandidat calon perseorangan tersebut memiliki sumber daya material yang cukup besar dalam beberapan tahun terakhir. Dan dari dua pasangan ini juga yang merupakan salah satu pasangan yang dapat berhasil menumbangkan lawan politik gabungan koalisi partai politik, bahkan calon petahana sekaligus juga berhasil di tumbangkan oleh dua pasangan calon tersebut dengan sumber daya material yang dimilikinya. Inilah penyebab cikal bakal proses oligarki terjadi di Lombok Timur.[31]

[31] Fajar Kuala Nugraha., "Pemilukada: Menguatnya Politik Oligark Lombok Timur Tahun 2013" Journal Of Governance 01, No. 02 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis terdapat pada teori-teori yang digunakan dalam menganalisis data. Hal ini terlihat sangat jelas pada paparan yang disampaikan oleh penelitian diatas yakni lebih fokus terhadap pembahasan pada proses terbentuknya sistem oligarki di Lombok Timur dengan menggunakan sebuah teori oligarki sebagai bahan analisis, serta yang menjadi objek penelitian ini yaitu pengusaha sebagai salah satu kontestan politik dalam pertarungan pemilukada di Lombok Timur. Sedangkan penelitian yang penulis buat yang menjadi objek penelitian disini yaitu pengusaha sebagai partisipan politik, sehingga fokus penelitian ini lebih kepada proses partisipasi politik dan motif yang dimiliki oleh pengusaha tersebut dalam kajian teori *rent seeking* dan partisipasi politik. Dari ketidaksamaan itulah akan mendapatkan sebuah data yang berlainan pula.

Kedua, M. Uhaib As'ad Jurnal As Siyasah, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016 Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, email: uhaibm@yahoo.com dengan judul Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik: Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan. Kajian permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana pembangunan interaksi oleh elite politik beserta instansi pemerintah, pengusaha tambang lokal, politisi atau elite partai politik dan masyarakat.Teori yang digunakan adalah teori pola struktur birokrasi paternalistik Karl D. Jackson, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan oleh filsuf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edmund Husserl dan Alfred Schultz sebagai metode untuk memahami sebuah kejadian dan hubungannya dengan orang-orang yang berada dalam keadaan tersebut. Hasil temuan penelitian diatas menunjukkan bahwa pengusaha dalam hal ini yaitu sebagai pengontrol badan legislatif maupun badan eksekutif dalam membuat sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menggunakan sumber daya material sebanyak-banyaknya untuk kepentingan perusahaan dan pribadinya yaitu melalui jaringan-jaringan pengusaha-pengusaha lainnya yang sudah berhasil menduduki tonggak kekuasaan politik baik dalam lembaga legislatif, maupun lembaga eksekutif guna memperoleh *support* kebijakan melalui sebuah pembuatan peraturan daerah yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan tambang dikalimantan selatan sebagai salah satu basis dalam menambah profit untuk perusahaan tambang yang mereka kelola.[32]

Teori yang digunakan dalam penelitian diatas merupakan pembeda dari penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian diatas memakai teori pola struktur birokrasi paternalistic sebagai alat analisis untuk melihat seberapa besar ikatan jaringan pengusaha dengan pengusaha lainnya yang sudah duduk di kekuasaan politik serta pengaruh yang dihasilkan dari hasil interaksi yang dibangun. Sedangkan penelitian yang penulis susun menggunakan teori *rent seeking* dan partisipasi politik sebagai bahan analisis untuk melihat proses pengusaha dalam membangun sebuah jaringan

[32] M. Uhaib As'ad., "Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik: Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Kalimantan Selatan" Jurnal As Siyasah, FISIP: Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin, Email: uhaibm@yahoo.com 01, No. 01 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik serta tujuan yang dicapai setelah proses pemilukada selesai. selain itu, penelitian yang penulis susun untuk objek lokasi yang diambil berbeda dengan penelitian diatas, penelitian diatas memilih objek lokasi yang diambil di Kalimantan Selatan, sedangkan penulis memilih objek lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur yang mana menjadi barometer utama di seluruh bagian provinsi-provinsi di Indonesia. Dan sudah pasti data yang diperoleh akan berbeda dari penelitian diatas.

Ketiga, I Made Sendra., Jurnal Kajian Budaya Volume. 10 Nomor. 20, Juli Tahun 2014., yang berjudul Hubungan Segitiga Antara Birokrat, Pengusaha, dan Politikus Partai Demokrasi Liberal (JIMINTO) dalam Pemilihan Umum di Jepang. Pemasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama, mengapa dalam panggung politik di Jepang selama berkuasanya Partai Demokrasi Liberal (JIMINTO), selalu terjadi kasus suap, korupsi, dan kolusi dengan perusahan-perusahaan besar, kedua, apakah kolusi dan kasus suap ini berpengaruh terhadap kredibilitas partai tersebut dimata konstituennya, dan bagaimana strategi yang digunakan oleh Partai Demokrasi Liberal (JIMINTO) dalam merekrut massa, sehingga partai ini berhasil mendominasi di panggung politik jepang selama tiga puluh delapan tahun lamanya. Adapun teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori budaya politik yang diungkapkan oleh seorang filsuf yang bernama Almond dan Powell, hasil temuan dalam penelitian ini adalah adanya budaya Jepang yang mengenal ikatan primordial Oyabun-Kobun, dimana didalam budaya ini setiap para elite politik harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirimkan kartu ucapan seperti selamat tahun baru, ucapan perkawinan, ucapan belasungkawa dan ucapan lainnya yang semua itu menggunakan sumber daya material sebagai alat untuk menjaga budaya Oyabun-Kobun di Jepang untuk menjaga popularitas konstituennya di depan public. Hal inilah yang mendorong seorang elite politik dan pengusaha untuk melakukan kerjasama dalam hal memenuhi segala kepentingan-kepentingan baik kepentingan politik maupun kepentingan secara pribadi.[33]

Dari paparan penelitian diatas ada kesamaan dalam penelitian yang akan penulis susun salah satu diantaranya ialah mahalnya biaya politik yang dikeluarkan oleh setiap kontestan politik dikarenakan adanya budaya *money politic* yang telah menjadi akar di setiap perhelatan pemilu di Provinsi Jawa Timur, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan ditingkat eksekutif. Karena mahalnya biaya politik yang dikeluarkan oleh setiap kontestan politik mendorong para elite politik membangun sebuah jaringan dengan pengusaha-pengusaha besar untuk memenangkan perhelatan pemilu. Teori yang digunakan untuk menganalisa data merupakan pembeda dari penelitian diatas dengan penelitian penulis, serta objek lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana secara geografis dan budaya politik sangat jauh berbeda dengan penelitian diatas, sehingga akan banyak mengahsilkan data yang jauh cukup berbeda dengan data yang akan penulis

[33] I Made Sendra.,"Hubungan Segitiga Antara Birokrat, Pengusaha, Dan Politikus Partai Demokrasi Liberal (JIMINTO) Dalam Pemilihan Umum Di Jepang" Jurnal Kajian Budaya, Fakultas Pariwisata: Universitas Udayana 10, No. 20, Juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatkan, dan hasil analisis data juga akan jauh berbeda dengan penelitian diatas.

Keempat, Dodi Suprihanto Skripsi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Padang Tahun 2011. Yang berjudul Pengusaha dan Politik: Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik di Sumatera Barat 1999-2009. Rumusan masalah yang digunakan adalah apa latar belakang para pengusaha di Sumatera Barat terjun ke dunia politik pada masa Reformasi, bagaimana keadaan ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Orde Baru, bagaimana keadaan ekonomi dan politik Sumatera Barat sehingga pengusaha berminat untuk terjun ke dunia politik pada masa reformasi. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sejarah untuk melihat histografi baik yang berbentuk kliping Koran, makalah-makalah, dokumen dan sumber lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sistem wawancara sebagai salah satu data tambahan untuk memperkuat data sebelumnya yang sudah diperoleh. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa masuknya pengusaha dalam dunia politik di Sumatera Barat ditandai dengan peranan penting pengusaha-pengusaha di Sumatera Barat dalam pertumbuhan ekonomi dan politik di Sumatera Barat semenjak era Orde Baru berkuasa. Pada era itu, para pengusaha lebih banyak bergabung dalam tubuh partai politik Golkar, sebab ketika itu partai Golkar merupakan salah satu partai penguasa di Indonesia dan sangat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertahan dengan perusahan yang dimilikinya. Seorang pengusaha di Sumatera Barat lebih banyak memilih tergabung dalam organisasi dan asosiasi pengusaha seperti KADIN, GAPENSI, APINDO. Tujuannya tidak lain yakni selain untuk mempertahankan perusahannya supaya tetap hidup, selain itu pula pengusaha juga ingin mendapatkan proyek-proyek yang dihasilkan oleh pemerintah dan mulai berafiliasi kepada partai politik yang berkuasa pada masa itu. Maka sebab itu, tidak heran jika melihat pengurus organisasi tersebut merupakan bagian partai Golkar di Sumatera Barat. Dan kejadian ini semakin membesar ketika pada masa Orde Baru mulai runtuh, dimana negara mulai menerapkan sistem baru yakni sistem multipartai, sehingga banyak para pengusaha di Sumatera Barat mendapatkan peluang besar untuk masuk lebih dalam dunia politik, dan dari kesempatan ini pula semakin mudahnya para pengusaha untuk masuk dalam ranah pemerintahan baik pada lembaga legislatif maupun dalam lembaga eksekutif untuk mempengaruhi sebuah kebijakan.[34]

Kelima, Masriadi, Jurnal *CIVICUS* Volume. 20 Nomor. 02 Desember Tahun 2016, Email: patu.masriadi@yahoo.co.id yang berjudul Perselingkuhan Penguasa dan Pengusaha Terhadap Perampasan Hak-Hak Publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kebijakan revitalisasi itu kebijakan public atau kebijakan bisnis?, kenapa kebijakan revitalisasi harus melakukan kerjasama antara penguasa dan pengusaha?,

[34] Dodi Suprihanto.,"Pengusaha dan Politik: Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik Sumatera Barat 1999-2009" (Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Padang Tahun 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lantas siapa saja aktor yang bersembunyi didalam persekongkolan tersebut atas nama kebijakan public?, dan siapa yang paling di menguntungkan, dan lantas untuk siapa kepentingan itu, sehingga harus melibatkan beberapa pihak swasta dalam membuat sebuah kebijakan revitalisasi tersebut?. Didalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori konsep kapitalisme yang diuraikan oleh Victor D. Lippit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Sensitivity analysis*, sebagai alat untuk menganalisis sebuah kebijakan public yang melihat dari segi proses pembangunan hingga sampai dengan melihat perilaku aktor yang terlibat didalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kebijakan revitalisasi lapangan karebosi Kota Makasar terlihat lebih berorientasi kepada kebijakan bisnis daripada kebijakan publik. Dari sinilah dapat dilihat bahwa orang yang paling diuntungkan dalam hal kebijakan revitalisasi ini yaitu hanya dari sektor bisnis daripada sektor publik. Bahkan dalam penelitian juga ditemukan bahwa adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak merampas hak-hak publik yang berada di Kota Makasar tersebut. Oleh sebab itu, kuatnya cengkraman pengusaha dalam sektor kebijakan publik membuat penguasa didalam sektor pemerintah tidak dapat melakukan hal apa-apa dalam menjaga dan menyediakan hak-hak publik dalam bentuk apapun. Sehingga kebijakan revitalisasi lapangan karebosi di Kota Makasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah terbukti tidak memberikan sedikit keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Makasar dalam kurun waktu 30 tahun kedepan. Maka sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi kerja untuk masalah ini. Sebab, jika hal ini terus terjadi maka dapat banyak merugikan masyarakat Kota Makasar untuk kedepannya, dan seharusnya juga pemerintah mengambil sikap tegas kepada para oknum-oknum politik yang sudah melakukan kolaborasi dengan pengusaha yang terlibat dalam pembuatan kebijakan revitalisasi lapangan karebosi di Kota Makasar untuk mengurangi angka kerugian baik dari sektor pemerintah maupun dalam sektor publik.[35]

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dibuat penulis dalam skripsi ini yakni terdapat pada teori yang digunakan. Salah satu teori yang digunakan oleh penelitian diatas yaitu menggunakan teori kapitalisme yang diungkapkan oleh Victor D. Lippit sedangkan penulis menggunakan teori rent seeking dan partisipasi politik sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Selain itu, lokasi penelitian diatas dengan penulis juga berbeda dilihat dalam segi wilayah penelitiannya. Penelitian diatas memilih objek penelitian di Kota Makasar, sedangkan penulis memilih objek penelitian di daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur. Maka sebab itu otomatis situasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik akan sangat jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun didalam karya ilmiah ini.

[35]Masriadi,"Perselingkuhan Penguasa Dan Pengusaha Terhadap Perampasan Hak-Hak Publik" Jurnal CIVICUS, Email: patu.masriadi@yahoo.co.id 20, No. 02 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan lebih fokus pada bagaimana proses partisipasi politik pengusaha dalam pemenangan ibu Khofifah dan Emil di pemilihan gubernur Provinsi Jawa Timur, dan melihat bagaimana motif yang dimiliki para pengusaha terhadap pemenangan ibu khofifah dan emil di pemilihan gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018 lalu. Maka sebab itu penelitian ini akan lebih di fokuskan kepada pengusaha-pengusaha yang ikut berpartisipasi dalam pemenangan ibu Khofifah dan Emil di pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang berperan aktif dalam pemenangan sehingga data-data yang akurat dapat diberikan sesuai dengan keperluan peneliti.

B. Kerangka Konseptual dan Teori

a. Teori Rente dan Pemburu Rente

Dalam pengertian sederhana yang lebih positif, rente merupakan sewa atas penggunaan faktor produksi seperti tanah, dan gedung industri. Dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap pengorbanan yang diberikan oleh tenaga kerja selalu mendapatkan upah. Sedangkan pemilik tanah dan gedungakan mendapatkan sebuah imbalan berupa bunga sewa (rente). Sehingga dalam ekonomi klasik *rent seeking* memiliki arti sebagai pemicu dalam pertumbuhan ekonomi, ini karena merupakan proses perolehan yang wajar dan sah seperti para pelaku ekonomi lainnya yakni berhak mendapatkan imbalan atas penggunaan alat produksinya.[36]

[36] Hudiyanto., *Ekonomi Politik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008): 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di berbagai literatur ekonomi politik, konsep *rent seeking* seringkali bermakna negatif atau tidak netral. Hal ini pemburu rente (*rent seeking)* dimaknai sebagai perilaku antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok lainnya yakni antara pengusaha dan pihak pemerintahan selalu ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah memanfaatkan hak milik publik dan faslitas negara. Pemanfaatan seperti ini dilakukan dengan pendekatan kepada penguasa politik yakni ikut aktif dalam kegiatan politik salah satunya ialah pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk mendapatkan simpati serta keuntungan besar dari proyek-proyek yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi mereka.[37] Perilaku *rent seeking* tidak hanya terjadi pada pelaku usaha saja melainkan juga pada pemerintah baik pelaku-pelaku individu yang bertindak sebagai anggota partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, maupun ketika individu itu bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai pimpinan perusahaan akan melakukan perilaku yang sama untuk memenuhi kepentingan pribadinya secara rasional.[38]

Menurut Jhon Girling Dalam tulisannya *"Corruption, Capitlism and Democrazy"* mengatakan bahwa perilaku korupsi tidak hanya melibatkan aktor yang ada dalam institusi pemerintah, tapi juga dalam cakupan yang cukup lebih luas, seperti misalnya hubungan antara

[37] Aprilia Fitria Wardani&Muhammad Findi, *Ekonomi Politik: Pemburu Rente*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019): 21
[38] James A. Caporaso & David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi* Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008): 322-323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha dan para elite politik untuk berbagi sumber daya negara. Maka jika konsep yang digunakan adalah demokrasi atau kebebasan secara tidak langsung konsep tersebut hanya berorientasi sebagai bentuk *Lobbying* saja, dimana dengan cara ini para pengusaha mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut akan banyak menimbulkan masalah, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Perilaku pemburu rente dibedakan dari perilaku mencari untung dalam usaha bisnis yang sehat. Di dalam usaha yang sehat akan selalu menciptakan nilai dan kemudian saling menguntungkan satu sama lain. Tetapi dalam praktik yang dilakukan oleh pemburu rente selalu mempengaruhi kekuasaan untuk mengambil keuntungan yang tidak memiliki kompensasi didalamnya.[39]

1. Rent Seeking Gordon Tullock

Pada dasarnya manusia memiliki mimpi yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, segala fasilitas yang ada dimanfaatkan oleh mereka guna memperoleh keuntungan yang optimal. Tidak menjadi hal yang tabu ketika mendengar para pengusaha banyak yang berminat terjun ke dunia politik sebagai jembatan untuk melancarkan segala kepentingan bisnis perusahannya.Sehingga dari beberapa partai politik dan elite politik tertarik untuk menjalin kerjasama dengan pengusaha-pengusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam mengambil keuntungan yang

[39] Ratnia Soliha, "Pola Relasi Bisnis dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking" Jurnal Wacana Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Email: ratniasolihah91@yahoo.co.id 01, No. 01, Maret 2016, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar-besarnya bagi kelompok mereka.Termasuk diantaranya ialah mempengaruhi setiap keputusan-keputusan politik dalam bentuk kebijakan publik yang ditujukan sebagai keuntungan pribadi. Maka dari tahapan-tahapan politik seperti inilah yang dikenal dengan *rent seeking* atau pemburu rente.

Pada tahun 1967, istilah *rent seeking* pertama dikenalkan oleh seorang filsuf yang bernama Gordo Tullock dengan memberikan pemahaman bahwa hubungan pemberian hak monopoli kepada pengusaha oleh penguasa. Selanjutnya gagasan tersebut berkembang dengan sebuah penjelasan bahwa pengusaha yang memperoleh lisensi khusus, monopoli, dan fasilitas lain dari penguasa sekaligus menghambat pelaku lain masuk pasar adalah pemburu rente. Kemudian lahirlah teori pemburu rente pada tahun 1974 yang dikenalkan oleh Anna Krueger. Teori ini menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan monopoli pada suatu bidang tertentu dari pihak yang berkuasa.[40] Namun demikian walaupun Anne Krueger sebagai ekonom yang pertama kali menggunakan kata *rent seeking*, tapi secara historis Gordon Tullock tetap menjadi orang pertama dalam menuliskan konseptual tentang praktik *rent seeking.*

Gordon Tullock membagi beberapa aspek tentang konsep teori *rent seeking* yakni sebagai berikut.

[40] Dadang Asriyadi, "Praktek Demokratisasi Oleh Pengusaha Dalam Perspektif Rent Seeking Behaviour" Jurnal Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang 15, No. 19 April 2019, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Welfare Cost* dan *Social Cost*

Dimana hal ini Tullock mengatakan bahwa harga komoditas tidak hanya ditentukan dengan *Welfare Cost* atau dapat disebut sebagai tariff atau harga komoditas misalnya pajak, upah, biaya produksi, namun juga termasuk biaya sosial (*Social Cost*).Biaya sosial adalah pajak atau umpeti yang harus dibayar untuk menjaga kestabilan keamanan sekaligus pendapatan perusahaan.Misalnya biaya sosial keamanan untuk para pengusaha dan penguasa lainnya agar tidak merusak kepentingan yang sudah direncanakan.Oleh karena itu, biaya sosial cenderung menjadi lahan investasi dan menjadi bagian dalam menentukan harga komoditas, misalnya ialah izin impor daging sapi hanya terbatas diberikan oleh pemerintah. Adanya batasan inilah para pengusaha melakukan suntikan dana kepada pemerintah terkait untuk mendapatkan izin impor tersebut. Inilah yang disebut sebagai biaya sosial (*Social Cost*).[41]

b. *Transfer Cost*

Transfer cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha-pengusaha dengan memberikan sumber daya kepada para penguasa baik dalam bentuk material, barang, jasa, maupun dukungan politik ketika perhelatan pemilu.

[41] Mohammad Didit Saleh& Aditya Perdana, "Praktik Rent Seeking dan Relasi Negara Dengan Kapital: Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel Oleh Gubernur Nur Alam Di Provinsi Sulawesi Tenggara" 03, No. 01 2019, 78-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Competing Rents*

Merupakan pihak pembisnis yang melakukan lobbying kepada negara untuk peraturan tertentu yang menyangkut pajak, distribusi, kuota impor, subsidi dan bantuan lain sebagainya.

2. Rent Seeking Michael Ross

Menurut Michael Ross terdapat tiga tipe *Rent Seeking* yakni sebagai berikut.:

a. *Rent Creation*

Dalam hal para pengusaha mencari sebuah keuntungan dengan memanfaatkan kebijakan yang telah dibuat oleh negara yakni dengan menyogok para elite politik, birokrasi, dan lain sebagainya.

b. *Rent Extraction*

hal ini para elite politik dan birokrat mencari keuntungan dengan memberikan sebuah ancaman kepada para pemilik modal dari peraturan-peraturan yang dibuat dan disepakati bersama.

c. *Rent Seizing*

Dimana terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk memperoleh hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi negara hanya untuk kepentingan individu dan kelompok pribadinya.[42]

[42] Ratnia Solihah, "Pola Relasi Bisnis dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking" Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjajaran, Email: ratniasolihah91@yahoo.co.id., Op.Cit., 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teori Partisipasi Politik

Di dalam kajian politik, partisipasi politik adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi[43] yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat keberhasilan sistem demokrasi di sebuah negara berkembang salah satunya yaitu negara Indonesia yang memiliki etnis, ras, dan agama multikultural serta memiliki beragam ideologi dalam beberapa naungan organisasi yang disebut sebagai partai politik. Seiring dengan pasang surutnya sistem perkembangan demokrasi, maka pada saat itu pula demokrasi mulai berrevolusi sejak berawal munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang juga berkeinginan untuk memodifikasi proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik. Kelompok seperti ini lahir ketika berkembangnya *post industrial* dan kelompok ini diberi nama sebagai gerakan sosial baru (*new social movement*). Menurut T. Tarrow social movements adalah tantangan kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama melalui interaksi secara terus-menerus dengan para elite, dan pejabat-pejabat.[44] Maka sebab itu, kemunculan kelompok seperti ini ada ketika mereka kecewa dengan kinerja partai politik yang selalu lebih memusatkan kepentingan partai politik daripada kepentingan publik. Sebab di dalam dunia politik tidak

[43] Novembri Yusuf Simanjuntak., "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu" Magister Ilmu Politik Kosentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, Email: *Zoentaksvembri@yahoo.co.id*, Jurnal Bawaslu 03, No. 03 2017, 308.
[44] Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008): 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang namanya kepentingan publik tetapi yang ada hanyalah kepentian partai politik.

Selain itu, partisipasi politik juga muncul ketika bersamaan dengan adanya pembangunan di sebuah negara untuk menciptakan sebuah sikap, perilaku, dan nilai bagi masyarakat yang terdampak oleh adanya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya bagi negara berkembang yang masih dalam tahapan sebagai negara maju. Sebab kadar partisipasi politik diukur oleh perkembangan soial dan ekonomi negara serta keberhasilan tahapan kemajuan pembangunan di sebuah negara. Hal ini dipertegas oleh Huntington dan Nelson yang mengatakan bahwa faktor-faktor pembangunan negara banyak mempengaruhi partisipasi politik di negara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, kadar partisipasi politik berhubungan erat dengan perkembangan sosial dan ekonomi negara dan tahap kemajuan pembangunan sebuah negara. Adanya keberhasilan pembangunan sebuah negara akan banyak menciptakan sebuah perubahan besar di dalam sebuah negara baik dalam nilai, sikap, dan perilaku bagi setiap anggota masyarakat yang terdampak oleh pembangunan tersebut.[45]

Disinilah sebab dan akibat munculnya gerakan sosial baru dari masyarakat yang belum puas dengan kinerja-kinerja yang diberikan oleh partai politik selama menjadi sebagai penyambung aspirasi rakyat dalam

[45] Yalvema Miaz., *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (Padang: UNP Press Padang, 2012): 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pembuatan keputusan mengenai kebijakan publik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah agenda kegiatan individu atau kelompok orang yang sering ikut serta dalam kegiatan politik seperti menyampaikan hak suara dalam pemilihan umum, mendatangi rapat umum, berinteraksi langsung dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintah, misalnya kegiatan musyawarah rencana kerja pembangunan desa (*Musrenbang*) yang diadakan setiap bulan januari dengan merujuk pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES). Yang setiap desa diamanatkan untuk merumuskan dokumen rencana 5 tahunan yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) dan dokumen rencana tahunan yaitu rancangan kerja pembangunan desa (RKPDES).[46] Dalam kegiatan inilah bukti bahwa masyarakat dan pejabat pemerintahan melakukan interkasi dan loby secara langsung untuk mempengaruhi proses keputusan dalam membuat kebijakan publik. Maka menurut Herbert McClosky mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan secara sukarela dari warga masyarakat dimana mereka secara bersama-sama mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan umum.[47]

[46] Rianingsih Djohani., "Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa" Canadian Internasional Development Agency (CIDA) dan The Asia Foundation (TAF)., Cetakan Pertama, 2008., 3.
[47] Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008): 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat diatas tidak jauh berbeda dengan, Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* yang memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi segala aktivitas proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik baik dalam bentuk memberikan hak pilihnya dalam pemilu maupun keikutsertaan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan.[48] Tipologi partisipasi politik dibagi menjadi dua bagian. *Pertama,* partisipasi aktif yaitu diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik seperti, menyampaikan aspirasi di depan publik, memberikan usulan dalam pembuatan kebijakan, dan terlibat aktif dalam kontestasi pemilihan wakil atau pemimpin pemerintahan. *Kedua,* partisipasi pasif yaitu keterlibatan seseorang yang hanya menunggu hasil keputusan kebijakan publik yang sudah dibentuk. Dari keterangan diatas setidaknya ada dua faktor terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik yakni sebagai berikut. *Pertama,* timbulnya kesadaran politik seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut andil dalam kehidupan masyarakat dan politik. *Kedua,* timbulnya kepercayaan kepada pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai wakil atau pemimpin negara dalam sistem politik.[49]

[48] Ramlan Surbakti., *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010): 180.
[49] Gun Gun Heryanto., *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019): 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa berhubungan dengan partisipasi politik merupakan bagian dari kesadaran politik yang tumbuh didalam setiap hati masyarakat sebagai pemegang kedaulatan terbesar dalam setiap perkembangan demokrasi di Indonesia. Kesadaran politik tumbuh berawal ketika masyarakat sudah banyak memiliki kesadaran bahwa dunia Pendidikan merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting untuk dilaksanakan agar menuju sebuah kesempurnaan hidup dalam mencari ilmu pengetahuan, karena dengan memiliki ilmu pengetahuan masyarakat akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk lebih sederhana dalam mengidentifikasi partisipasi politik seseorang dapat diukur dalam pola piramida partisipasi politik I dan II yakni menurut Milbrath dan Goel, dan menurut David F Roth dan Frank L. Wilson yang membagi beberapa kategori partisipasi politik sebagai berikut. [50]

[50] Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008): 372-373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 2.1

Piramida Partisipasi Politik Menurut Milbrath dan Goel

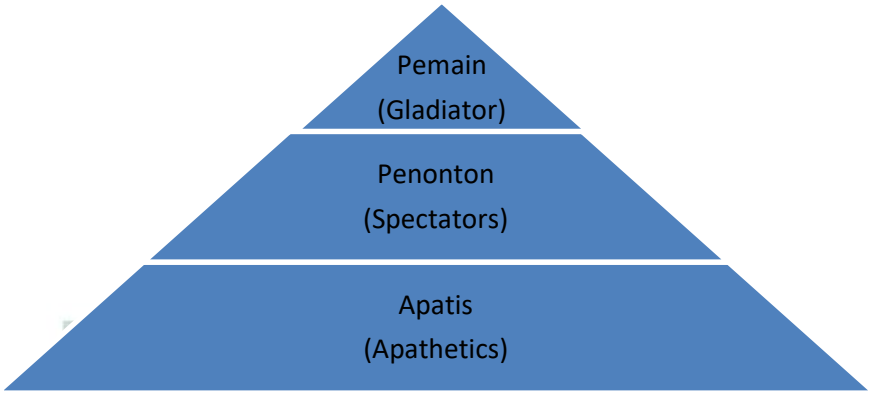

Pada peringkat paling atas diisi oleh para actor yang banyak terlibat dalam aktivitas politik baik sebagai kontestan politik, pemimpin partai politik, hingga pengusaha yang juga merupakan salah satu pemodal sekaligus pimpinan partai politik yang merupakan penggerak utama dalam setiap perhelatan pesta demokrasi berlangsung. Sedangkan diperingkat kedua diisi oleh para pendukung yaitu relawan pemenangan, tim sukses pemenangan, kader partai politik, atau pengusaha yang ikut andil dalam proses pemenangan baik dalam bentuk dukungan hingga sampai dalam bentuk bantuan barang atau jasa. Selanjutnya diperingkat terakhir diisi oleh simpatisan masyarakat yang tidak banyak terjun di dunia politik, bahkan menolak diri terlibat aktif dalam dunia politik dan tidak tahu menahu dalam proses aktivitas politik atau bisa disebut sebagai apatis politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 2.2

Piramida Partisipasi Politik II

Menurut David F Roth dan Frank L. Wilson

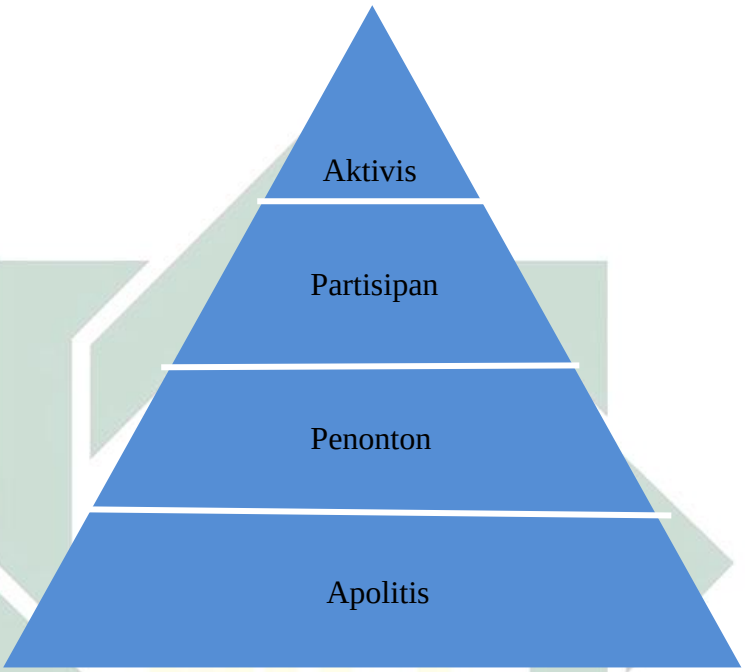

Pertama, aktivis disini diartikan sebagai seorang pemimpin politik, calon pemimpin politik, atau pengusaha dan kelompok kepentingan lainnya yang memiliki power dan modal besar sebagai penggerak utama dalam kancah politik. *Kedua*, partisipan disini diartikan sebagai seseorang yang banyak bekerja dalam proses pemenangan, diantaranya ialah anggota partai politik, tim sukses, relawan pemenangan, hingga kelompok-kelompok pengusaha yang terlibat aktif dalam proses pemenangan baik dalam bentuk dukungan, hingga bantuan barang dan jasa dalam aktivitas politik. Ketiga, penonton disini diartikan sebagai seseorang yang secara sukarela hadir dalam proses politik, seseorang yang banyak terlibat dalam diskusi politik, pengamat politik, hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai memberikan hak suaranya kepada calon politik yang didukungnya. Keempat, apolitis disini diartikan sebagai seseorang yang telah mengikrarkan dirinya untuk tidak terjun dalam dunia politik, dan tidak tahu menahu dalam urusan politik, bahkan apolitis juga tidak memberikan hak suaranya kepada calon pemimpin politiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Didalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan motede kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hal demikian bertujuan untuk memperoleh data secara tertulis maupun lisan dari orang-orang yang ingin diamati. Kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk deskriptif. Oleh karena itu, penulis akan lebih banyak mendeskripsikan hasil temuan yaitu berupa informasi terkait data yang di peroleh melalui penelitian lapangan baik berupa tulisan maupun secara lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan. kemudian penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui partisipasi politik pengusaha dalam pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc dalam pemilihan kepela daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.

Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Artinya ialah dalam obyek kajian ini akan lebih banyak mendeskripsikan data-data temuan baik secara tulisan, lisan dan perilaku untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada.[51]

[51] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017): 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun proses penelitian studi kasus kualitatif dapat dimulai dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu satu kasus secara khusus dan kasus ini bisa dapat berupa entitas yang kongkret, misalnya ialah, individu, kelompok kecil, organisasi atau kemitraan. Kuncinya disini adalah untuk mendefinisikan kasus yang mudah dibatasi atau dideskripsi dalam bentuk parameter tertentu misalnya tempat dan waktu yang lebih spesifik.[52]

Ciri yang paling utama dari studi kasus kualitatif yang baik adalah studi kasus tersebut memperlihatkan pemahaman yang mendalam tentang kasus yang ingin diteliti. Dalam rangka menyempurnakan penelitian ini, maka penulis akan banyak menghimpun beragam bentuk data, mulai dari hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi, hingga audiovisual. Biasanya didalam dunia penelitian bersandar pada satu sumber data saja tidak mencukupi untuk mengembangkan pemahaman mendalam ini.[53] Oleh sebab itu, dari penelitian ini penulis menggunakan tipe studi kasus instrumental tunggal untuk terfokus pada isu atau persoalan, kemudian penulis akan memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut dalam bentuk deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mempermudah proses pemilihan tempat dan waktu penelitian ini, maka penulis akan lebih banyak melihat peluang kesulitan dan kemudahan dalam memilih tempat dan waktu penelitian untuk dikaji lebih dalam sebagai media pendukung memperoleh data yang diharapkan. Hal ini dilakukan untuk

[52] Jhon W. Creswell, *penelitian kualitatif & Research Design: Choosing Among Five Appoches, Third Edition.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)., edisi ke-3., 137.
[53] Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah penulis mencari data agar lebih efektif dan akurat dalam proses penelitian.

Oleh sebab itu, penulis memilih objek penelitian ini dilakukan di daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu tempat penyelenggara pemilu dilaksanakan dimana ibu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. sebagai salah satu kontestan politik di pertarungan pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur dilaksanakan.

C. Informan Penelitian

Subyek penelitian merupakan wadah untuk memperoleh sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diteliti. Oleh sebab itu, dalam mendapatkan sumberdata yang tepat maka penulis akan menggunakan dua teknik pendekatan yaitu *Purposive sampling dan Snowball Sampling*. Adapun yang dimaksud dari dua istilah tersebut adalah *Pertama, Purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu yakni memilih salah satu aktor yang banyak berpartisipasi dalam proses pemenangan. Sehingga dari pertimbangan ini, aktor-aktor tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang ingin di teliti, atau mungkin aktor tersebut salah satu penguasa yang memiliki power sehingga dapat mempermudah penulis dalam menjelajahi objek penelitian yang ingin diteliti. *Kedua,* informan selanjutnya dipilih dari informan awal untuk menunjukkan orang lain yang mungkin dapat memberikan informasi yang sama hingga sampai menunjukkan kejenuhan informasi. Hal ini yang dimaksud dengan Teknik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Snowball Sampling*). *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya hanya dilakukan oleh responden dengan jumlah sedikit, lama-lama berkembang menjadi lebih banyak.[54] Dari dua pendekatan diatas bertujuan agar setiap data yang diperoleh dapat menjawab segala masalah penelitian yang diteliti, khusunya di bidang partisipasi politik pengusaha dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Timur. Maka dalam hal ini informan yang ditunjuk oleh penulis untuk memberikan informasi ini adalah pengusaha-pengusaha, tim sukses, dan partai pengusung yang banyak berpartisipasi untuk proses pemenangan ibu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. baik dalam kebutuhan finansial, barang, maupun jasa di pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Maka penulis memilih informan dibawah ini untuk memberikan informasi terkait dengan karya ilmiah yang ingin penulis teliti, sebab penulis menilai bahwa informan yang penulis pilih layak untuk memberikan informasi untuk melengkapi data-data penilitian, karena dari hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa informan-informan inilah yang banyak terlibat aktif didalam setiap proses pemenangan Ibu Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018 baik dalam segi material maupun non-material.

[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: ALFABETA, 2015), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Daftar Informan

Nama Informan	Profil Informan	Status Informan
Bpk.Dedy Prasetyo	Awal sebelum saya berani untuk membuka usaha, pada tahun 1993-1996 saya memulai masuk dunia bisnis yakni sebagai karyawan di PT. Maspion, setelah itu pada tahun 2001-2002 saya bekerja sebagai Outrech Workes Program Sosial Penganggulangan Narkoba, tidak lama kemudian pada tahun 2003 saya mulai memberanikan diri terjun di dunia politik yang mana pada saat itu saya resmi menjadi bagian salah satu kader Partai Demokrat di Surabaya, sehingga pada tahun 2004 saya di perintah oleh partai politik untuk Bersama-sama mensukseskan pemilihn presiden SBY-JK sebagai sekertaris Tim Pemenangan. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2006 hingga sekarang. Dan pada tahun 2009-	- Sekertaris Tim Kampanye SBY-JK Kota Surabaya Tahun 2004. - Anggota DPRD Kota Surabaya tahun 2009-2014. - Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kota Surabaya Tahun 2004-Sekarang. - Sekertaris DPC Partai Demokrat Kota Surabaya. - Sebagai Anggota Devisi Diklat DPP Partai Demokrat Tahun 2015-Sekarang. - Direktur Perusahaan PT. Tunjungan Elektronik Centre

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	2014 saya masuk dunia politik kembali yakni sebagai anggota DPRD Surabaya secara bersamaan pula saya mulai masuk di dalam dunia bisnis kembali yang mana pada saat itu saya ditunjuk sebagai Legal Corporate di PT. Lamicitra Nusantara Tbk. Dan pada tahun 2014 saya pribadi mulai memberanikan diri untuk membuka perusahaan baru secara mandiri di PT. Tunjungan Electronik Centre sebagai direktur utama, sekaligus pada tahun itu juga saya ditunjuk sebagai tenaga ahli pimpinan DPRD Kota Surabaya hingga saat ini.	
Bpk. Priyono	Jadi pengusaha sejak tahun 1984 di bidang perkapalan PT NaJatim, kemudian ditahun 1987 di bidang industry air mineral Aqua sebagai Komisaris, kemudian 1988 membangun PT. Lamicitra Nusantara dibidang jasa kontraktor pembangunan dll. Hingga sampai saat ini Mulai	- Konsultan Politik - Tim Pemenangan Ibu Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018. - Direktur Utama PT. Lamicitra Nusantara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mengenal politik sudah lama sebab saya termasuk bagian dari orang kepercayaan Gus Dur selaku Presiden, dan seseorang yang dekat dengan seorang Pakde Karwo selaku Gubernur Jatim, di dalam dunia politik saya lebih banyak menyumbang ide dan gagasan lebih tepatnya sebagai konsultan politik bagi seorang kandidat.	
Bpk. TM	Sejak awal tahun 2004 saya memulai berbisnis dibidang kesenian dan berakhir hingga sampai tahun 2010 dimana saya ditunjuk oleh Ketua Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur (DKJT) untuk masuk sebagai wakil ketua (DKJT) dan berakhir pada tahun 2015 saya menggantikan posisi sebagai ketua (DKJT) hingga sekarang. Sementara saya sebagai ketua DKJT saya mendapat amanah untuk terjun di dunia bisnis kembali yakni berprofesi sebagai Humas di Perusahaan Bioskop Movimax Mall Kapas Krampung Sby	- Birokrat dibidang kesenian sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur. - Anggota Partai Demokrat - Calon Anggota DPRD Provinsi Jatim Dapil V Lumajang-Jember. - Tim Khusus Pemenangan Ibu Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018 - Humas di Perusahaan Bioskop Movimax Mall Kapas Krampung Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pada tahun 2019 hingga saat ini. Sedangkan untuk di dunia politik saya berkecimpung dalam politik sejak tahun 1999 hingga sampai saat ini selalu menemani langkah politik yang dilaksanakan oleh seorang Pakde Karwo yakni senior saya selama menjadi mahasiswa.	
Bpk. TH	pada tahun 2000 saya membuka usaha secara mandiri dibidang jasa hingga sampai saat ini alhamdulillah masih menggeluti bidang usaha tersebut Sebagai Komisaris Utama di PT. Tirta Intan Cahaya. Selama berbisnis saya sering bekerjasama dengan Markas Besar TNI AL dan Markas Besar TNI AD, awal masuk di dunia politik sejak tahun 2014 di dalam pemilihan legislatif sebagai ketua Tim Pemenangan Anggota DPR RI Dapil Pasuruan.	- Ketua Relawan Progo Jawa Timur - Tim Pemenangan Ibu Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018. - Anggota Partai Gerindra - Komisaris Utama di PT. Tirta Intan Cahaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bpk. DK	Awal karir saya Sebagai Pengusaha mulai berjalan pada tahun 2000 di bidang jasa kontraktor, dalam hal ini saya sebagai Direktur Utama di Perusahaan PT. Tirta Intan Cahaya dan berakhir di tahun 2020 di sebab kan karena mewabahnya pandemi covid-19. Sedangkan pada tahun 2004 saya baru masuk dalam dunia politik yakni sebagai pendamping kakek saya yang merupakan bagian dari anggota TNI AL yang menyebabkan saya tertarik masuk dalam dunia politik. saya banyak belajar dari kakes saya terkait dengan sistem politik, maka sebab itu pada tahun 2009 saya sudah mulai berani untuk masuk menjadi simpatisan bagian dari Partai Gerindra dan pada tahun 2014 saya resmi menjadi anggota atau kader dari partai tersebut.	- Tim Pemenangan Ibu Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018. - Anggota Partai Gerindra. - Direktur Utama PT Tirta Intan Cahaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bpk. GW	Memulai berbisnis ketika saya memiliki lahan perkebunan buah-buahan yang cukup besar pada tahun 1990 dengan nama perusahaan WWFruits hal ini berlanjut ketika tahun 2004 kemudian saya mengembangkan usaha saya sebagai Pengusaha Importir dan Exportir dibidang Pertanian di Kabupaten Malang, yakni di PT. Wijaya Fruits sebagai direktur utama kemudian pada tahun 2006 sampai hari ini saya ditunjuk sebagai Pembina di PT. Tani Sejati, dan masuk dalam dunia politik pada tahun 2014 pada saat pemilihan Presiden Jokowi yakni saya ditunjuk oleh beliau sebagai ketua Bara JP Jatim dan pada tahun 2018 saya kembali diperintah oleh beliau untuk membantu Ibu Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018.	- Ketua BARA JP Jatim - Tim Pemenangan Ibu Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018. - Direktur Utama PT. Wijaya Fruits sebagai Pengusaha Importir dan Eksportir Pertanian.

Sumber: Hasil Temuan Peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Menurut Sanafiah Faisal di dalam bukunya Sugiono yang berjudul *"Metode Penelitian Tindakan Komperhensif"* mengatakan bahwa mengkaji observasi dalam tiga tahapan yaitu tahapan observasi partisipatif, observasi secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tak berstruktur. Adapun maksud dari tahapan-tahapan tersebut ialah *Pertama*, tahapan observasi partisipatif, dalam tahapan ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari bersamaan dengan orang-orang yang diamati atau yang dipergunakan sebagai sumber data penelitian. *Kedua*, tahapan observasi terus terang atau tersamar, dalam tahapan ini, peneliti melukan pengumpulan data dengan cara menyatakan yang sebenarnya kepada subyek data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. *Ketiga*, observasi tak berstruktur, pada tahapan ini, peniliti belum menentukan arah yang jelas terhadap objek penelitian, sehingga observasi dilakukan selama proses kegiatan berlangsung.[55] Oleh sebab itu Pada tahapan observasi penulis menggunakan dua tahapan yaitu tahapan observasi partisipatif, dan tahapan observasi terus terang dan tersamar dengan menggunakan pendekatan etnografi sebagai metode untuk mengidentifikasi serta menentukan suatu kelompok berkebudayaan sama yang hendak diteliti. Biasanya kelompok seperti ini merupakan kelompok dimana para anggotanya telah hidup bersama dalam waktu yang lama, sehingga bahasa, pola perilaku, dan sikap mereka telah terbentuk menjadi pola yang

[55] Ibid., 258-260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diamati.[56] Dari pendekatan tersebut kemudian penulis menggunakan alat observasi seperti kamera, bulpoin, buku catatan lapangan, dll untuk mengadakan pengamatan terhadap partisipasi politik pengusaha dalam proses pemenangan ibu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. yang merupakan salah satu kontestan politik dalam pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pewawancara (interviewer) dengan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan.[57] Kemudian dalam proses wawancara penulis akan menggunakan teknik wawancara mendalam *(Indepth Interview)* sebagai dasar untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berisi tentang pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi untuk menghindari kehilangan informasi data penelitian.

Wawancara yang dilakukan didalam penelitian ini yaitu lebih bersifat terbuka. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, melainkan berulang-ulang. Di dalam proses pelaksanaan sebelum mengumpulkan data dilapangan, maka penulis menyusun daftar pertanyaan untuk digunakan sebagai pedoman wawancara. Namun dalam pelaksanaan pedoman tersebut tidak bersifat tetap. Melainkan bersifat fleksibel tergantung

[56] John W. Creswell., *Penelitian Kualitatif & Design: Choosing Among Five Appoaches, Third Edition*,. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)., edisi ke-3, hal 131.
[57] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Op.Cit., 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi dan kondisi yang berada di lapangan. Maka dalam hal ini instrument yang akan digunakan dalam wawancara mendalam yakni menggunakan pedoman wawancara, bulpoin, kamera, buku, catatan lapangan dan alat perekam.[58]

c. Dokumentasi

Dalam tahap ini, penulis menggunakan studi dokumentasi untuk memperoleh data hasil laporan kegiatan program pendukung selama penelitian berlangsung guna mengetahui segala proses pelaksanaan penelitian dan kendala yang dialami selama penelitian berlangsung

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah itu pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Patton didalam bukunya Lexy J. Moleong mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urain dasar.[59]

Menurut Miles dan Habermas sebagaimana dikutip oleh Burhan Bungin memberikan pernyataan bahwa terdapat tiga tahapan dalam analisis data diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:[60]

1) Reduksi Data

[58] Basuki., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006): 173
[59] Ibid., 280
[60] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reduksi data adalah proses penyederhanaan sebuah data. dalam tahapan ini difokuskan untuk mengumpulkan data lapangan yang telah terkumpul. Dari data lapangan tersebut, kemudian dipilih untuk dilihat relevansi terhadap tujuan penelitian. Setelah itu, dari data yang terpilih disederhanakan, diklarifikasikan, serta dijabarkan sesuai dengan tema penelitian untuk direkomendasikan dalam bentuk data tambahan, kemudian hasilnya diuraikan dalam bentuk ringkasan.[61]

2) Penyajian Data

Dalam penyajian data untuk melihat gambaran tema penelitian, maka harus melihat bagian-bagian tertentu dari penelitian dengan membuat penggambaran secara deskriptif dari rumusan masalah yang ingin diteliti. Pada tahapan ini, proses penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif terlebih dahulu, kemudian hasil teks tersebut diringkas dalam bentuk uraian yang sederhana untuk menggambarkan proses hasil temuan berdasarkan susunan-susunan yang telah disesuaikan dalam uraian tersebut.[62]

3) Verifikasi

Pada tahapan ini, peneliti akan menguji kebenaran dari setiap makna yang muncul pada hasil data penelitian. Disamping fokus terhadap penyederhanaan, klarifikasi data juga sangat diperlukan agar lebih terfokus pada abstraksi data yang tertuang dalam uraian penelitian, kemudian setiap data yang menunjang uraian tersebut selanjutnya

[61] Ibid.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan klarifikasi kembali baik dengan informasi dilapangan maupun melalui forum-forum diskus dengan rekan apabila hasil klarifikasi memperkuat kesimpulan atas data, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut siap diberhentikan.[63]

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong dalam menetapkan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut didasarkan atas beberapa kriteria tertentu yaitu ada empat kriteria dalam pemeriksaan keabsahan data diantaranya ialah kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).[64] Maka untuk menjaga keabsahan data yang perlu digunakan adalah teknik pengamatan lapangan dan teknik trianggulasi data.Teknik trianggulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dari kriteria derajat kepercayaan. Oleh sebab itu Lexy J. Moleong mengungkapkan bahwa trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan objek yang lain.[65]Di luar itu hanya sebatas sebagai pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Dalam trianggulasi data perlu dilakukan dengan cara cross check, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan hasil data observasi atau hasil data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari

[63] Ibid.
[64] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op. Cit., 327
[65] Ibid., 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua teknik pengumpulan data tersebut, maka penulis mayakini bahwa data yang dikumpulkan sudah valid.[66]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka untuk itu penulis akan memaparkan beberapa sistematika pembahasan terdiri dari lima bab segai berikut:

Bab pertama (I) berisi mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual.

Bab kedua (II) berisi kajian teoritik mengenai teori Rente dan Pemburu Rente, Teori Partisipasi Politik, atau kajian pustka yang sesuai dalam kajian penelitian.

Bab ketiga (III) berisi tentang kajian metodologi penelitian meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian, tahapan-tahapan penelitian, Teknik mengumpulkan data, Teknik analisis data, Teknik pemeriksa data, dan sistematika pokok pembahasan.

Bab keempat (IV) berisi tentang penyajian dan analisis data yang akan menyajikan hasil data lapangan serta analisis terhadap partisipasi politik pengusaha terhadap pemengan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.

[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima (V) berisi mengenai penutup yang terdiri dari pokok kesimpulan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Gambar 3.1

Peta Pembagian Administrasi Provinsi Jawa Timur.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Provinsi Jawa Timur secara Geografis terletak di bagian timur kepulauan Jawa, yakni diantaranya 111^0-$114{,}4^0$ Bujung Timur dan $7{,}12^0$-$3{,}48^0$ di Lintang Selatan, yang memiliki perbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, selat Bali di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, dan Provinsi Jawa Tengah disisi barat Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu wilayah berpotensi besar sebagai laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (Katimin), dan bagian dari lintas perekonomian Indonesia. Selain itu, Provinsi Jawa Timur termasuk Provinsi yang terluas di kepulauan Jawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni memiliki keluasan wilayah sekitar 48.035,73 km^2, terdiri dari dua bagian utama. *Pertama,* luas wilayah Provinsi Jawa Timur di bagian daratan memiliki keluasan wilayah sebesar 88,80% atau setara dengan 42,652,42 km^2. *Kedua,* luas wilayah Provinsi Jawa Timur di bagian Kepulauan Madura memiliki luas sekitar 11,20% atau setara dengan 538,31 km^2.[67]

Gambar 3.2

Data Sebaran Wilayah Provinsi Jawa Timur

Wilayah Administrasi	2016	2017	2018
Kabupaten	29	29	29
Kota	9	9	9
Kecamatan	665	666	666
Kelurahan/Desa	8.501	8.501	8.501
Jumlah PNS			
Laki-Laki	231.133	173.113	213.912
Perempuan	207.210	207.210	208.037
Total	438.343	380.232	421.949

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Secara administrasi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, yakni terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang terbagi menjadi 666 kecamatan dan 8,501 kelurahan/desa. Kabupaten administratif yang termasuk wilayah terluas ialah Kabupaten Banyuwangi dengan besar wilayah 5.782,40 km^2, disusul oleh Kabupaten Malang yang memiliki luas wilayah 3.530,65 km^2, dan Kabupaten Jember dengan luas wilayah 3.092,34 km^2. Sebaliknya, Provinsi Jawa Timur juga memiliki tiga Kota terkecil yaitu Kota

[67] Jatim.bps.go.id. (data diakses pada 12 januari 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto dengan memiliki luas wilayah 16,47 km^2, kemudian disusul oleh Kota Blitar dengan luas wilayah 32,57 km^2, dan Kota Madiun dengan luas wilayah 33,92 km^2.[68]

Dari luasan wilayah tersebut, maka pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur telah dihuni oleh penduduk dengan jumlah 39.500.851 jiwa, dengan beberapa perincian penduduk diantaranya laki-laki 19.502.156 jiwa, dan penduduk perempuan sebesar 19.998.695 jiwa. Dengan jumlah tersebut, penduduk di Provinsi Jawa Timur setara dengan 17% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Namun ada beberapa kota yang tidak memiliki luas wilayah terbesar, tetapi jumlah penduduk yang tinggal di kota tersebut sangat besar. Misalnya Kota Surabaya adalah salah satu Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang hanya memiliki luas wilayah yang tidak cukup luas yaitu sebesar 350,54 km^2, namun memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat menembus angka sebesar 2.885.555 jiwa. Sebaliknya, dari luas wilayah di Provinsi Jawa Timur juga masih ada beberapa kota yang memiliki luas wilayah dan penduduk terkecil salah satunya di Kota Mojokerto hanya memiliki luas kewilayahan sebesar 16,47 km^2 dengan prospek jumlah penduduk sebesar 128.282 jiwa.[69]

[68] Ibid.
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3

Jumlah Proyeksi Penduduk Dari Tahun 2010-2020 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

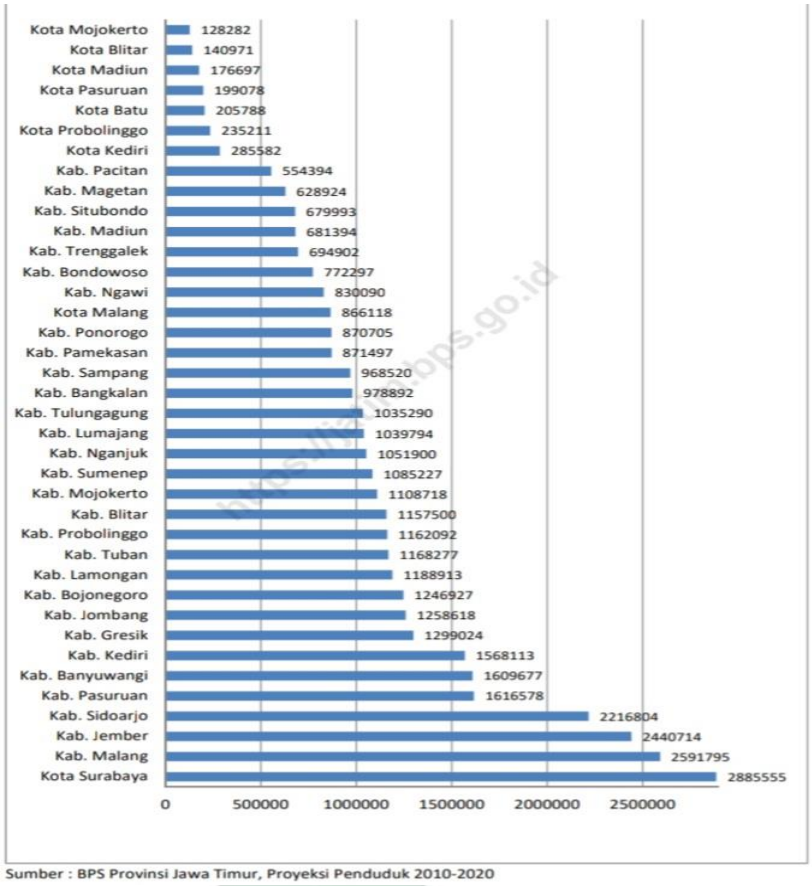

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Dengan melihat luasan wilayah Kabupaten/Kota dan jumlah sebaran penduduk yang memiliki perbedaan signifikan sudah tentu sangat berdampak besar pada setiap dinamika perkembangan sistem demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa timur, baik perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada akhirnya akan mengalami sebuah revolusi besar setiap perkembangan zaman dan dapat dengan mudah mempetakan penyebarannya di Jawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur, karena seluruh kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga suara rakyat yang disalurkan di segala bidang pemerintahan akan sangat menentukan bagi perkembangan Provinsi Jawa Timur.[70]

Perekonomian Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 5,50% tumbuh menjadi 5.52% berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan ini termasuk perkembangan ekonomi yang tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Misalnya data terakhir di dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa perekonomian Provinsi Jawa Timur Triwulan IV-2019 dibandingkan dengan Triwulan IV-2018 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai hingga Rp. 2.352,43 triliun, sedangkan PDRB atas dasar konstan mencapai hingga Rp. 1.650,14 triliun.[71]

[70] Ibid.
[71] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4

Data Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2019 dan Data Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019

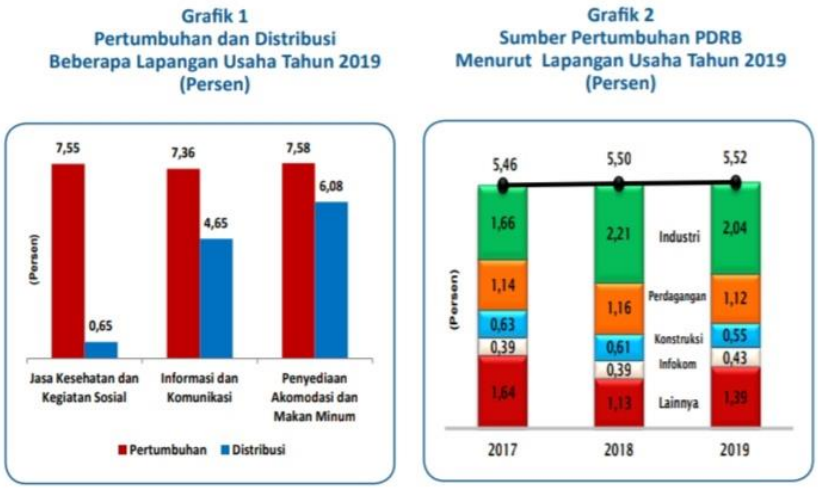

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengembangan agroindustri didalam industri pengolahan dapat menjadi sebuah alternatif bagi perkembangan industri masa depan karena banyak memiliki manfaat dan keunggulan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Keunggulan tersebut diantaranya ialah *Pertama*, potensi penggunaan bahan baku berupa komoditas pertanian, serta potensi pasar domsetik yang besar. *Kedua*, peningkatan nilai tambah industri pengolahan dan peningkatan ekspor, impor. *Ketiga*, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan dari struktur ekonomi baik berbasis pertanian maupun berbasis industri.[72] Maka sebab itu, ekonomi Provinsi Jawa

[72] Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI)., *Indonesia Tahun 2030: Ide dan Gagasan Ekonomi Muda FEB UI*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017): 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur didalam triwulan IV-2019 dibandingkan dengan triwulan IV-2018 tumbuh menjadi 5,54%. Sedangkan di sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terlihat pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 7,58%, diikuti dengan jasa kesehatan dan kegiatan sosial berkisar 7,55%, dan informasi dan komunikasi 7,36%. Kondisi seperti ini dapat terjadi ketika adanya peningkatan pertumbuhan penyediaan akomodasi sebesar 8,86%. Maka bila dilihat dari pertumbuhannya dapat disimpulkan bahwa, lapangan usaha industry pengolahan memiliki sumber pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 2,04%, diikuti oleh perdagangan besar maupun perdagangan yang bersifat eceran, dan reaparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,12%, sedangkan dibidang kontruksi sebesar 0,55%, serta bidang informasi dan komunikasi berkontribusi sebesar 0,34%.[73]

Gambar 3.5

Data Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019

Sumber: Badan Pusat Statisti Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

[73] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2019 didominasi oleh tiga lapisan lapangan usaha yaitu *Pertama*, lapangan usaha industri pengolahan dengan berkontribusi sebesar 30,24% baik dari perdagangan besar maupun perdagangan eceran. *Kedua*, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 18,46%. *Ketiga*, dibidang pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 11,43%. Kondisi seperti ini didukung oleh kinerja yang dilakukan lapangan usaha jasa Pendidikan yang mana telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 8,56%, disusul oleh informasi dan komunikasi berkisar 8,39%, serta diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,04%.[74]

2. Pengusaha, Uang, dan Elit Politik

a. Pengusaha

Entrepreneur, berasal dari kata yang berbaha Inggris yaitu memiliki makna sebagai wirausaha atau pengusaha, maka wirausaha adalah seseorang yang mampu mengetahui segala peluang yang ada, kemudian memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.[75] Oleh sebab itu, seorang wirausahawan selalu identic dengan seseorang yang memiliki sumber daya besar serta memiliki gagasan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam memecahkan persoalan untuk memperbaiki kehidupan didalam dunia usaha. Sedangkan Menurut Peter F Drucker mengatakan bahwa seorang pengusaha atau wirausaha adalah seseorang yang memiliki

[74] Ibid.
[75] Eko Agus Alfianto., "Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat", Dosen FISIP Universitas Yudharta Pasuruan, Jurnal Heritage 01, No. 02 Januari 2012, 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan untuk menciptakan hal baru, dari sesuatu hal yang sudah ada. Pendapat tersebut di pertegas oleh Schumpeter yang mengatakan bahwa wirausaha merupakan seseorang yang dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan sistem ekonomi dengan menggunakan sumber daya baik yang berupa material, barang, maupun jasa dan bahkan seseorang tersebut menggunakan sumber daya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan melalui organisasi bisnis dan politik yang baru maupun yang sudah ada.[76]

b. Uang

Secara garis besar uang memiliki makna sebagai alat penukar yang mempunyai standard nilai yang besar sebagai jalan alternatif untuk melakukan transaksi baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan definisi uang menurut para pakar ahli ekonom masih belom menemukan definisi yang tepat terkait makna yang terkandung di dalam uang, maka sebab itu definisi yang disampaikan yang mereka sampaikan masih banyak menimbulkan perbedaan yang mana sebagai berikut.

Menurut Nazhim al-Syamry sebagaimana dikutip oleh Emily Nur Saidy mengatakan bahwa *"...setiap sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas undang-undang atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran*

[76] Kuntowicaksono., "Pengaruh Pengetahuan Wirausaha dan Kemampuan Memecahkan Masalah Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Sekolah Menengah Kejuruan", Prodi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang Indonesia, Journal Of Economic Education 01, No. 01 2012., 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beragam terhadap komoditi dan jasa, serta dapat menyelesaikan tanggungan, maka termasuk dalam lingkup uang".[77]

Sedangkan dalam pandangan Al-Gazali uang adalah barang yang banyak digunakan masyarakat sebagai jalan mediasi untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidup yang secara subtansi tidak ada nilai apapun didalamnya, tetapi memiliki manfaat besar bagi setiap insan manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan mereka.[78] Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa uang adalah alat pertukaran yang sah dengan memiliki nilai sebagai alat untuk melakukan transaksi baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan agar segala kenginan yang dimiliki oleh setiap manusia dapat terwujud sesuai dengan harapan yang mereka inginkan.

c. Elite Politik

Dalam kehidupan masyarakat pasti menjumpai dua arus kelompok besar yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, walaupun segala perubahan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh peran yang mereka punya. Dari dua arus kelompok inilah yang lazim banyak disebut sebagai kaum *oligark* dan elite politik. Kelompok *oligark* merupakan kelompok yang memiliki sumber daya yang besar untuk dipergunakan sebagai alat dalam memperoleh kekuasaan. Sedangkan elite menurut istilah Laswell merupakan kelompok yang telah

---

[77] Emily Nur Saidy., *"Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam"*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makasar, Email: sirajuddinroy@gmail.com., *Jurnal LAA MAISYIR*, Volume. 06 Nomor. 02 Desember 2017., hal. 28

[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki lebih dari apa yang telah berhasil dimiliki oleh orang lain.[79] Sementara menurut pandangan yang dikemukakan Pareto elite adalah mereka yang berhasil memperoleh keuntungan yang lebih dari apa yang telah berhasil dimiliki oleh orang lain.[80] maka dalam hal ini Pareto memberikan dua opsi didalam memberikan pemahaman tentang elite, *Pertama,* mereka yang mengendalikan kekuasaan *(Governing Elite). Kedua,* mereka yang berada diluar kendali kekuasaan *(Non Governing Elite).*[81]

Maka dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara aktor *oligark* atau pengusaha dengan elit memiliki pola yang berbeda. Pengusaha atau *oligark* lebih memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan kekuasaan lainnya, maka dalam hal ini kaum *oligark* atau pengusaha lebih banyak menggunakan kekayaan daripada kekuasaan yang mereka miliki. Sedangkan kaum elit menggunakan pengaruh minoritas sebagai sumber daya kekuasaan non-material untuk mendapatkan profit yang besar. Tetapi disisi lain kaum *oligark* atau pengusaha dan elit tidak harus memiliki peran yang berbeda, sebab banyak seorang pengusaha yang hanya mempunyai sumber daya materil saja, dan sebaliknya banyak para elit politik tidak memiliki kekayaan apapun tapi berhasil mendatangkan kekuasaan.

---

[79] Abdul Chalik., *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 26-27
[80] Ibid., 27
[81] Mochammad Farisi., "Sirkulasi Elit Politik Lokal Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Provinsi Jambi", Fisipol Universitas Jambi, email: siraf_faris@yahoo.com, Jurnal JISIP-UNJA 01, No. 01 Juli – Desember 2017., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penyajian Dan Analisis Data

Dunia usaha dan dunia politik secara hakikat merupakan hubungan timbal balik antara kepentingan seorang pengusaha dengan penguasa di dunia politik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal. Maka bukan hal baru ketika semua orang melihat bahwa pengusaha terlibat di dalam dunia politik baik dalam proses kontestasi pemilihan maupun dalam proses pembuatan kebijakan baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian lebih dari 90% penulis melihat bahwa dibidang pemerintahan baik dalam jabatan eksekutif hingga sampai legislatif berlatar belakang sebagai pengusaha. Sehingga tidak heran ketika banyak calon kepala daerah dalam kontestasi politik mendapatkan banyak bantuan dari pengusaha baik dalam bentuk jasa, barang, maupun material dalam setiap proses kontestasi pemilihan berlangsung. Oleh sebab itu, ketika calon Kepala Daerah yang mereka bantu terpilih, maka Kepala Daerah terpilih tersebut akan melibatkan para pengusaha yang sudah membantunya dalam setiap proyek kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur yang memiliki basis industri dalam setiap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statisik Provinsi Jawa Timur (BPS) pada tahun 2018 pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibidang industri makanan dan minuman memiliki PDRB terbesar yaitu berkisar hingga Rp. 214,64 triliun dengan jumlah pertumbuhan berkisar 14,04%. Sedangkan pertumbuhan terbesar kedua yaitu dibidang industri pengelolaan tembakau yakni tembus di angka Rp. 175,74 triliun yang tumbuh pada tahun 2018 dengan angka pertumbuhan 5,68%. Sementara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang industri mesin dan perlengkapan memiliki pertumbuhan PDRB terkecil yaitu sebesar Rp. 1,15 triliun dengan jumlah pertumbuhan sekitar 1,78%.[82]

Kemudian bukan hal baru ketika kita mendengar bahwa pengaruh politik dalam dunia usaha, baik dalam institusi politik maupun kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di daerah seringkali dunia usaha dan politik memiliki peran penting didalam setiap perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya terhadap perkembangan politik nasional. Hal ini seperti yang diungkap didalam hasil tesis Olson yang dikutip oleh Heriyono didalam karya ilmiahnya yang mengatakan bahwa kepolitikan nasional di suatu negara menyebabkan merosotnya rata-rata pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut.[83]

Peristiwa mengakarnya partisipasi politik pengusaha pada dunia politik semakin membesar ketika di era Reformasi dimana sistem multipartai mulai berlaku dikancah politik nasional. Dengan demikian mengharuskan setiap partai politik untuk bersikap mandiri dalam perebutan kekuasaan dikancah politik baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal. Sehingga dalam hal ini kekuatan finansial setiap partai politik menjadi tolak ukur penentu kekuatan partai dalam bersaing memperebutkan kekuasaan baik dibidang eksekutif, legislatif, dan serta lembaga-lembaga politik strategis yang lainnya. Salah satu akses kekuatan finansial pada partai politik banyak didapatkan dari kalangan pengusaha. Ini disebabkan karena mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan dalam setiap perhelatan pemilu, serta munculnya budaya *patron dan client* yang telah terbentuk lama membuat

[82] Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2019
[83] Heriyono., "Ekonomi Politik Dalam Bisnis", Dosen Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon, Jurnal Ekonomi 01, No. 02 Januari-April 2013., 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha dan elite politik untuk berkolusi dalam penguasaan atas kekuasaan politik dan dunia usaha.[84]

1. **Partisipasi Politik Pengusaha Dalam Proses Pilkada Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.**

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung baik dalam proses kontestasi pemilihan maupun dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun secara spontan dilakukan dengan cara di mobilisasi.[85] Menurut Kamarulzaman kata partisipasi berasal dari dua kata yakni "*Participation"* dari Bahasa inggris yang artinya ikut serta dan *"Partisipatie"* berasal dari Bahasa belanda artinya ikut serta mengambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan politik, sedangkan menurut Poerwadarminta partisipasi merupakan ikut berperan serta dalam kegiatan. Oleh sebab itu, secara hakikat dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang individua tau kelompok dalam aktivitas-aktivitas politik yang lebih besar.[86] Sedangkan Pengusaha adalah *oligarch* yaitu merupakan seseorang yang selalu berusaha mempertahankan segala kekayaannya dengan berbagai cara dan mereka sudah pasti akan mengusahi, serta mengendalikan

[84] Meki Herianto, Adlin., "Partisipasi Politik Pengusaha Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014", Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Email: mex_he@gmail.com 02, No. 02 2015., 2
[85] Primandha Sukma Nur Wardhani., "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum", Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, No. 01 2018., 59
[86] Agung Suharyanto., "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah", Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 02, No. 02 2004., 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan meningkatkan posisi sosial yang dimiliki.[87]

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik pengusaha adalah seseorang yang memiliki sumber daya tinggi sebagai alat untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan dengan ikut serta dalam proses politik baik dalam proses kontestasi pemilihan hingga sampai proses pembuatan kebijakan serta kegiatan-kegiatan politik lainnya.

partisipasi politik pengusaha dalam proses pemenangan Khofifah-Emil di Pilkada Provinsi Jawa Timur 2018 dapat diidentifikasi dalam tiga tahapan pola didalam teori piramida Milbrat dan Goel tentang partisipasi politik diantaranya sebagai berikut. *Pertama,* Pemain *(Gladiator)* yaitu actor yang banyak terlibat didalam setiap aktivitas politik baik sebagai kontestan politik, pimpinan partai politik, hingga sampai pengusaha yang memiliki modal besar sebagai penggerak utama dalam setiap perhelatan pemilu berlangsung.[88] Dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018 pemain (Gladiator) yang dimaksud disini yang terlalu banyak aktif didalam setiap aktivitas-aktivitas politik adalah seorang kandidat politik yang sedang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur 2018, hal yang dimaksud disini yakni Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si selaku calon Gubernur dan Dr. H. Emil Elistianto Dardak, M.Sc selaku calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 yang merupakan salah satu kandidat politik

[87] Vellayati Hajad., "Oligark Sebagai Rent Seeker: Haruskah?", Op.Cit., 28
[88] Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008): 372

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diusung oleh enam partai politik diantaranya ialah Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PAN, Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai PPP.[89] Selain seorang kandidat mendapatkan rekomendasi dari partai politik parlemen, seorang kandidat juga berhasil mendapatkan dukungan partai politik non-parlemen diantaranya yaitu Partai PKPI dan Partai PBB. Awalnya seorang kandidat Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di usung oleh Partai Demokrat, kemudian disusul oleh Partai Nasdem dan Hanura, setelah itu selang beberapa waktu seorang kandidat mendapatkan rekomendasi, dari Partai PAN, Partai Golkar, dan Partai PPP.[90] Membahas soal rekomendasi yang diberikan oleh enam partai pengusung kepada Ibu Khofifah dan danEmil Dardak di kontestasi pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018 tidak lepas dengan peran seorang pengusaha yang memiliki proteksi sumber daya yang besar serta proteksi jaringan elit politik dalam membantu seorang kandidat Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bpk. Emil Dardak untuk mendapatkan rekomendasi dari partai pengusung sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Hal ini seperti yang diungkap oleh Bpk. Dedy Presetyo selaku sekertaris DPC Partai Demokrat Surabaya, sekaligus pengusaha dibidang jasa yang merupakan direktur utama di PT. Tunjungan Elektronik Centre yang mengatakan bahwa:

> *"…seorang kandidat Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagai calon Gubernur dan Wakil*

[89] www.KOMPAS.com, (pada 25 Juni 2020, Pukul: 20:30)
[90] www.m.detik.com, (Pada 25 Juni 2020, Pukul: 20:49)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018, ketika itu saya Bersama jajaran pengurus Partai Demokrat baik ditingkat pusat sampai ditingkat daerah membantu beliau dalam proses loby untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi beliau menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Selain itu, seorang kandidat juga dibantu oleh beberapa pengusaha besar baik dalam bidang jasa hingga dibidang produksi juga ikut serta didalam proses loby kepada pimpinan partai politik bahwa seorang kandidat layak untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur tahun 2018".[91]

Hal senada juga diungkapkan oleh Bpk. TM selaku tim khusus pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, mengatakan bahwa:

"...seorang kandidat ibu Khofifah Indar Parawansa dan mas Emil Dardak dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi salah satunya harus mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang memiliki kursi di parlemen dan dalam hal ini beliau tidak sendiri, saya waktu itu, bersama stakeholder-stakeholder yang lain berbagai profesi seperti pengusaha, birokrasi, hingga sampai organisasi kemsyarakatan juga ikut andil didalam membantu beliau dalam proses loby politik untuk mendapatkan rekomendasi dari para pimpinan partai politik bahwa seorang kandidat ibu Khofifah Indar Parawansa dan mas Emil Dardak sudah layak dijadikan

[91] Bpk. Dedy Prasetyo., Wawancara Oleh Penulis, (Pada 14 Februari 2020, Pukul: 10:20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024".[92]

Hal serupa juga diperkuat oleh Bpk. Priyono selaku konsultan politik, sekaligus sebagai direktur utama di PT. Lamicitra Nusantara, serta direktur utama di Mall PGS Surabaya dan merupakan bagian dari tim pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang mengatakan bahwa:

"...membahas soal rekomendasi yang diberikan oleh pimpinan partai politik kepada seorang kandidat Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak tidak lepas dengan jerih payah yang dikeluarkan oleh seorang pengusaha yang banyak membantu beliau melakukan loby politik kepada setiap pimpinan partai politik untuk mendapatkan surat rekomendasi maju sebagai kontestan politik di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 dan ketika itu saya juga membantu mengkomunikasikan beliau kepada setiap jaringan-jaringan elit politik yang saya punya untuk ikut andil mendukung sekaligus membantu ibu Khofifah Indar Parawansa dan mas Emil Dardak mendapatkan surat rekomendasi dari masing-masing pimpinan partai pengsung".[93]

Kedua, Penonton *(Spectators)* yaitu terdiri dari relawan pemangan, tim sukses pemenangan, kader partai politik, birokrasi, atau pengusaha yang ikut andil dalam proses pemenangan baik dalam bentuk dukungan hingga sampai dalam bentuk bantuan barang, jasa hingga sampai bantuan berupa finansial.[94] yang

[92] Bpk. TM., Wawancara Oleh Penulis Via Daring, (Pada 15 Mei 2020, Pukul 18:15).
[93] Bpk. Priyono., Wawancara Oleh Penulis, (14 Februari 2020, Pukul: 11:29)
[94] Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Op.Cit., 372

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan Penonton *(Spectators)* disini didalam proses pemenagan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018 yaitu seseorang yang ikut andil di dalam proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018. Dimana setiap prosesi kegiatan-kegiatan politik yang berkaitan dengan pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim banyak melibatkan stakeholder-stakeholder diantaranya yaitu berprofesi sebagai pengurus partai politik, kader partai politik, pengusaha yang memiliki sumber daya besar serta perusahaan yang bonafit, kumpulan birokrasi baik ditingkat pusat sampai daerah, dan pimpinan organisasi massa atau relawan inilah orang-orang yang banyak dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018. Oleh sebab itu, dalam hal ini baik pengusaha, birokrasi, partai pengusung dan pimpinan organisasi massa serta relawan pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak bersama-sama berkolaborasi secara serentak membantu beliau baik dalam bentuk barang, jasa maupun finansial semata-mata hanya untuk bertujuan agar ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, sebab apa yang sudah menjadi visi dan misi beliau dipandang sudah layak untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim sebelumnya.

Hal tersebut serupa dengan apa yang sudah menjadi pernyataan Bpk. GW yang merupakan salah satu pengusaha eksportir dibidang pertanian yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan direktur utama di PT. Wijaya Fruits, sekaligus relawan pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang mana ketika itu Bpk. GW merupakan ketua Bara JP Jawa Timur organisasi yang dibentuk untuk pemenangan bapak Presiden Jokowi pada tahun 2014 dan menjadi relawan keduakalinya untuk mendukung ibu Khofifah dan Emil Dardak sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 atas dasar perintah langsung dari bapak Presiden Joko Widodo kepada Bpk. GW untuk memenangkan ibu Khofifah dan Emil di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018. Maka sebab itu, Bpk. GW memberikan pernyataan bahwa:

> *"...saya selama menjadi tim pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak telah banyak memberikan sebuah bonus demografi electoral kepada beliau, salah satu kegiatan yang sering saya lakukan untuk pemenangan beliau yaitu membuat sosialisasi di berbagai daerah seperti Tuban, Malang, Gresik, Madiun, dan Pasuruan dan dalam kegitan sosialisasi tersebut saya sering melibatkan kelompok tani, sebab disini karena saya berprofesi sebagai pengusaha eksportir dibidang pertanian. Selain itu saya juga banyak membantu baik dibidang finansial maupun barang seperti kaos, souvenir dll untuk didistribusikan kepada pemilih di Provinsi Jawa Timur, agar ibu Khofifah dan Emil banyak dikenal oleh masyarakat dan dalam setiap kegiatan sosialisasi untuk jumlah finansial yang dikeluarkan dalam pemenangan ibu Khofifah dan Emil Dardak tidak sedikit, saya pribadi sudah banyak mengeluarkan modal ratusan juta lebih*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk proses pemenangan beliau menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur 2018".[95]

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bpk. TH selaku pengusaha dibidang jasa yang merupakan komisaris di PT. Tirta Intan Cahaya yang ditunjuk langsung oleh ibu Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu tim pemenangan di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018, yang mana beliau ditunjuk langsung oleh ibu Khofifah sebagai Kepala Progo Jawa Timur sebagai posko pemenangan beliau di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini Bpk. TH memberikan pernyataan bahwa:

"...ketika saya ditunjuk oleh ibu sebagai Kepala Relawan Progo Jawa Timur, saya berperan sebagai fasilitator yakni memberikan kebutuhan-kebutuhan sosialisasi seperti APK, kaos, souvenir dll sekaligus konseptor dalam setiap kegiatan-kegiatan politik pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 dan untuk menjadi salah satu fasilitator pemenangan saya sudah banyak mengeluarkan modal ratusan juta lebih untuk membantu ibu Khofifah dan Emil Dardak dalam memfasilitasi segenap relawan yang ada di Jawa Timur hanya untuk supaya ibu Khofifah dan Emil Dardak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024".[96]

[95] Bpk. GW., Wawancara Oleh Penulis Via Daring, (Pada 12 Januari 2020, Pukul: 14:29)
[96] Bpk. TH., Wawancara Oleh Penulis, (Pada 06 Februari 2020, Pukul: 16:46)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bpk. Dedy Prasetyo selaku pengusaha yang merupakan direktur utama di PT. Tunjungan Elektronik Centre, sekaligus pengurus di DPC Partai Demokrat Surabaya yang merupakan salah satu partai pengusung ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak bertarung dalam kancah politik di pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018. Sebagaimana Bpk. Dedy mengatakan bahwa:

> *"...pada saat ibu Khofifah dan Emil Dardak di tetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 oleh KPU, ketika itu saya dan seluruh jajaran pengurus di Partai Demokrat mendapatkan perintah untuk terus mengawal ibu Khofifah dan Emil Dardak dalam memenangakan kontestasi pemilihan di Jawa Timur. Dan pada saat itu pula ketika masuk dalam tahapan proses kampanye saya mengajak ibu Khofifah selaku calon Gubernur bertemu Bpk. Priyono selaku Direktur Utama perusahaan Pusat Grosir Surabaya (PGS) untuk meminta dukungan beliau serta meminta restu beliau melakukan sosialisasi kepada segenap masyarakat di pasar mall PGS Surabaya sekaligus melibatkan ibu Khofifah Indar Parawansa selaku calon Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk menyapa masyarakat pemilih yang berada di pasar mall PGS Surabaya, setelah mendapatkan dukungan dari Bpk. Priyono saya bersama ibu Khofifah mulai melakukan kegiatan sosialisasi di sekitar wilayah pasa mall PGS Surabaya untuk menyapa seluruh masyarakat pemilih yang berada di PGS Surabaya".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pernyataan tersebut dibenarkan langsung oleh Bpk. Priyono selaku Direktur Utama di pasar mall PGS Surabaya, sekaligus direktur utama di PT. Lamicitra Nusantara yang menyatakan bahwa:

> *"...yaa waktu itu mas Dedy beserta ibu Khofifah menemui saya dan menjelaskan visi dan misi beliau untuk Jawa Timur kedepannya dan ketika itu pula ibu Khofifah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi konsultan beliau dalam bidang perekonomian yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dan ketika itu pula saya support penuh terhadap apa yang menjadi visi dan misi beliau selaku calon Gubernur di Provinsi Jawa Timur, sebab saya melihat bahwa Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang berbasis industri dan ini butuh sosok pemimpin yang betul mampu untuk terus mengembangkan industri-industri lokal yang ada di Jawa Timur untuk menjadi salah satu industri yang banyak memberikan pendapatan daerah bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur".*[97]

Selain melibatkan para pengusaha dan pimpinan partai politik, setiap proses pemenangan ibu Khofifah dan Emil Dardak juga banyak melibatkan para birokrasi dijajaran pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Salah satu diantaranya yaitu birokrasi dibidang Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Sosial, serta birokrasi-birokrasi yang lain yang berada di bawah naungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bpk. TM selaku tim khusus

[97] Bpk. Priyono., Wawancara Oleh Penulis, (pada 14 Februari 2020, Pukul: 11:29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 yang mengatakan bahwa:

> *"...ketika ibu Khofifah dan Emil resmi dinyatakan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018, maka ketika itu pula Bpk Presiden Joko Widodo memberikan akomodasi berupa finansial yang cukup besar untuk diberikan kepada ibu Khofifah selaku calon Gubernur di Jawa Timur sebagai modal dalam setiap proses pemenangan yang mana modal tersebut disalurkan kepada Bpk X dan diteruskan kepada segenap birokrasi di pemerintahan Provinsi Jawa Timur khususnya di bidang Biro Hukum, dan Kesejahteraan sosial untuk dikelola sebagai modal dalam setiap proses pemenangan. Dan pada saat itu juga saya diperintah oleh Bpk X untuk melakukan mobilisasi massa dibidang kesenian dengan mengawal mas Emil Dardak selaku Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 untuk mensosialisasikan visi dan misi beliau kepada seluruh masyarakat pemilih di Provinsi Jawa Timur. dan setelah saya menerima perintah tersebut saya langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan kesenian diantaranya yaitu di Pasuruan Kabupaten/Kota, Madiun Kabupaten/Kota, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember dan yang terakhir yakni melakukan sosialisasi di Kota Surabaya".*[98]

Hal senada juga diungkapkan oleh Bpk. DK selaku Direktur Utama di PT Tirta Intan Cahaya yang merupakan salah satu tim pemenangan ibu Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018 yang menyatakan bahwa *"...dalam proses*

[98] Bpk. TM., Wawancara Oleh Penulis melalui Via Daring, (pada 15 Mei 2020, Pukul 18:15)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenangan beliau bukan hanya pengusaha saja yang berperan tetapi semua stakeholder-stekholder politik yang lain juga berperan salah satunya yaitu dilingkup birokrasi".[99]

Ketiga, Apatis *(Apathetics)* yakni seseorang yang tidak banyak terjun didunia politik, bahkan menolak diri untuk terlibat aktif dalam setiap aktivitas politik. hal seperti ini hanya terjadi kepada masyarakat pemilih khususnya pada generasi milenial yang beranggapan bahwa politik adalah ladang dimana para koruptor baru diciptakan. Dan ini sangat tidak relevan ketika disangkut pautkan dengan pengusaha, karena sedikit atau banyak sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha dalam dunia bisnisnya tetap saja mereka masih bergantung kepada apa yang sudah dikeluarkan oleh para elite politik, sebab berbicara soal politik sangat berpengaruh terhadap urusan-urusan dunia usaha. Sehingga mau tidak mau pengusaha harus ikut andil didalam setiap proses politik, karena apa yang menjadi produk politik bakal berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia usaha yang mereka geluti.

Dengan demikian hubungan antara pengusaha dengan dunia politik merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab beribacara soal politik juga berpengaruh terhadap berkembangnya dunia usaha, karena kebijakan-kebijakan politik seringkali berhubungan dengan dunia usaha. Hal ini sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bpk. Priyono yang mengatakan bahwa:

"…hubungan dunia usaha dan dunia politik 99,95% memiliki keterkaitan yang sangat erat. Oleh sebab itu, keterlibatan pengusaha dalam kontestasi

[99] Bpk DK., Wawancara Oleh Penulis, (Pada 03 Februari 2020, Pukul 18:30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilkada di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang lalu terjadi bukan hanya sekali, tetapi dalam setiap perhelatan pemilu pengusaha selalu mengambil perannya untuk terlibat aktif dalam memberikan dukungan dan serta melihat sisi peluang kemenangan calon yang diusung sebagai pondasi kelancaran dunia usaha, sebab berbicara soal politik juga berbicara soal produk-produk yang dikeluarkan seperti peraturan-peraturan yang dibentuk melalui proses politik seringkali berkaitan dengan perkembangan dunia usaha".[100]

Pendapat ini juga diperkuat oleh Bpk Dedy selaku pengusaha sekaligus tokoh politik di Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai politik yang mengusung ibu Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018 mengatakan bahwa:

"...pengusaha dan politik 99,9% sangat memiliki hubungan yang erat diantara keduanya. Oleh sebab itu, keterlibatan pengusaha dalam kontestasi Pilkada di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 terjadi bukan hanya sekali, tetapi dalam setiap perhelatan pemilu pengusaha selalu mengambil perannya masing-masing untuk melihat peluang kemenangan calon yang diusung sebagai pondasi kelancaran dunia usaha, sebab berjalan atau tidaknya dunia usaha tergantung dengan kebijakan politik yang dikeluarkan, dan selamanya pengusaha dan dunia politik akan terus bersinergi dalam setiap mensukseskan program-program kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Timur".[101]

[100] Bpk. Priyono., Wawancara Oleh Penulis, (14 Februari 2020, Pukul: 11:29).
[101] Bpk. Dedy Prasetyo., Wawancara Oleh Penulis, (14 Februari 2020 Pukul: 10:20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada juga diungkapkan oleh Bpk. DK selaku pengusaha yang sering aktif di dalam dunia politik mengatakan bahwa:

> *"...keterlibatan pengusaha dalam Pilgub Jatim 2018 bukan hal baru di dengar sebelum ibu khofifah-emil mencalonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur, melainkan setiap perhelatan pemilu baik ditingkat nasional maupun daerah setiap pengusaha sudah mengambil perannya masing-masing untuk memasukkan kepentingan-kepentingan mereka dalam mempengaruhi keputusan politik dan dalam hal ini wajar ketika pengusaha terlibat dalam politik, sebab segala urusan politik sudah pasti berpengaruh terhadap dunia usaha".*[102]

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik pengusaha dan dunia politik merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Sebab berbicara soal politik juga tidak lepas berbicara soal pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Jawa Timur, sehingga hal ini suka atau tidak suka pengusaha dan para elite politik saling berkolaborasi satu sama lain untuk meningkat kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di Jawa Timur. salah satu diantaranya ialah pembangunan insfrastruktur yang masih banyak dibenahi oleh pemerintah daerah Jawa Timur dalam meningkatkan pendapatan daerah dan merantas kemiskinan yang ada di daerah. Dan hal ini sangat memerlukan kaki tangan dari seorang pengusaha dibidangnya untuk berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam mewujudkannya. Maka tidak heran ketika kita semua melihat bahwa ada campur tangan pengusaha dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa

[102] Bpk. DK., Wawancara Oleh Penulis, (03 Februari 2020 Pukul: 18:30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Emil Dardak di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018, sebab antara pengusaha dan pengusa mempunyai hubungan timbal balik dalam setiap proses pembuatan kebijakan berlangsung. Tetapi sebaliknya ketika pengusaha terlalu banyak mengintervensi dalam setiap kebijakan politik juga akan menimbulkan problem-problem baru khususnya feedback yang diberikan oleh pemerintah provinsi banyak ketidaksesuaian antara keinginan rakyat dengan keinginan para elite politik dan pengusaha yang ikut andil dalam setiap pembuatan kebijakan. Bahkan perilaku seperti ini akan banyak melahirkan para koruptor-koruptor baru di bidang pemerintahan khususnya di pemerintahan provinsi ini karena dalam setiap proses pembuatan kebijakan pemerintah selalu banyak melibatkan pengusaha-pengusaha untuk menjalankan visi dan misi yang sudah di sosialisasikan ketika menjadi kontestan politik.[103]

2. Faktor Pendorong Keterlibatan Pengusaha dalam Proses Pemenangan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018.

Pengusaha dan penguasa elite politik merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Sebab intervensi yang diberikan oleh negara akan sangat berpengaruh terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi yang dijalankan oleh dunia usaha khususnya di Provinsi Jawa Timur. Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya negara dan dunia usaha dapat menjadi pesaing antara pengusaha dan penguasa elite politik dalam mendistorsi mekanisme pembentukan harga di pasar-pasar lokal

[103] Fahri Hamzah., *Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemeberantasan Korupsi Sistemik*, (Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2012): 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah. Oleh sebab itu pengusaha berkolaborasi bersama negara sebagai pemangku kebijakan untuk mempengaruhi segala proses pembuatan kebijakan, sebagai salah satu tujuan mereka dalam mengembangkan dunia usaha.[104]

Maka dalam hal ini pola relasi antara pengusaha dan penguasa elite politik semakin besar kekuatannya ketika sistem politik berjalan secara demokratis. yang mana berdampak kepada 80% jabatan politik baik ditingkat eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan-jabatan politik yang lain diisi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pengusaha. Selain pengusaha menduduki jabatan-jabatan politik pengusaha juga banyak terlibat aktif didalam setiap proses pemenangan pemilu khususnya di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 yang mana dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifah dan Emil Dardak pengusaha berperan sebagai salah satu tim pemenangan dengan memberikan sumber dayanya baik berupa barang, jasa, maupun finansial sebagai salah satu modal pengusaha untuk kepentingan dunia usaha. Tindakan-tindakan seperti inilah yang disebut dengan *rent seeking* (pemburu rente), sebab pengusaha menggunakan sumber dayanya sebagai kekuatan mereka untuk merantai para elite politik demi kelancaran dunia usaha.

Menurut Didik J Rachbini sebagaimana dikutip didalam sebuah artikel Ratnia Solihah yang mengatakan bahwa didalam sebuah kajian ekonomi politik *rent seeking* (pemburu rente) merupakan perburuan pendapatan dengan cara monopoli,

[104] Fahri Hamzah., *Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, (Perpustakaan Nasional RI: Yayasan Faham Indonesia, 2007): 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lisensi dan penggunaan modal kekuasaan didalam kepentingan bisnis.[105] Oleh sebab itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keterlibatan pengusaha dalam setiap proses pemilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki sebagai kekuatan untuk merantai para elite politik, sebab ketika calon yang mereka usung terpilih sebagai pemimpin, maka ketika itu pula mereka akan menagih apa yang sudah mereka keluarkan dengan mempengaruhi segala proses pembuatan kebijakan sebagai salah satu bentuk upaya mereka dalam mengembangkan usaha. Hal demikian terjadi ketika proses kontestasi politik di Provinsi Jawa Timur 2018 berlangsung yakni seorang kandidat Khofifah dan Emil didalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2023 yang mana setiap proses kampanye yang dilakukan oleh seorang kandidat banyak melibatkan stakeholder-stakholder baik yang berprofesi sebagai pejabat publik, wirausaha, guru, birokrasi, tokoh agama, dll dengan memberikan bantuan baik berupa barang atau material yang tertuang didalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak yakni sebagai berikut.[106]

Pertama, Renville Antonio, SH, M.H beliau merupakan Sekertaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, sekaligus Anggota DPRD Jawa Timur, memberikan bantuan dana kampanye kepada seorang kandidat Ibu Khofifah dan Emil dengan

---

[105] Ratnia Solihah., "Pola Relasi Bisnis dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi Kasus Rent Seeking", Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjajaran, Email: ratniasolihah91@yahoo.co.id, Jurnal Wacana Politik 01, No. 01 Maret 2016., 42

[106] Data Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Kepada Pasangan Calon Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak, Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018, Arsip Data KPU Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah uang tunai pada tanggal 26 Februari 2018 sekitar Rp. 50.000.000,00 dengan bukti register 006/KAMIL/II/2018.[107]

Kedua, Drs Masnuh MA beliau merupakan Ketua Tim Pemenangan Ibu Khofifah dan Emil di wilayah Kabupaten Sidoarjo,[108] sekaligus Direktur Utama di perusahan PT. Masrur And Son di bidang usaha tiang listrik,[109] juga memberikan sumbangsih baik secara material, barang maupun jasa kepada seorang kandidat Ibu Khofifah dan Emil di Pilgub Jatim 2018 yakni memberikan 3.500 barang berbentuk kaos TC 28 pada tanggal 10 Maret 2018 dengan dihitung secara materil sekitar Rp. 73.500.000,00 dengan bukti register 008/KAMIL/III/2018.[110]

Ketiga, Rachmad Rudiyanto merupakan Dewan Penasihat di Gerakan Bangbang Wetan Surabaya, sekaligus pengusaha dibidang percetakan di daerah Lidah Kulon Kota Surabaya,[111] juga ikut serta didalam memberikan sumbangsih besar terhadap proses pemenangan Ibu Khofifah dan Emil di Pilgub Jatim 2018 yakni bantuan berupa konsumsi sejumlah 4.000 Pack pada tanggal 18 April 2018 dengan dihitung secara materil berkisar Rp. 70.000.000,00 dengan bukti register 023/KAMIL/IV/2018.[112]

Keempat, Rif'ah Nuroniyah beliau merupakan seorang birokrat yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah di SMP Khadijah Surabaya,[113] juga ikut andil

---

[107] Ibid.
[108] https://duta.co/saksi-dibayar-disuruh-mancing-h-masnuh-ujian-menuju-kemenangan-khofifah-emil, (pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul: 11:58).
[109] https://jatimnet.com/pengusaha-tiang-listrik-dukung-cak-nur-jadi-bupati-sidoarjo, (pada tanggal, 12 Agustus 2020, pukul: 11:59).
[110] Ibid.
[111] Mochamad Syafiudin., "Politik Profetik Dalam Gerakan BangBang Wetan Surabaya", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya Agustus 2019., 45-71
[112] Ibid.
[113] https://www.smpkhadijah.com/staff-karyawan/., (pada tanggal 12 Agustus 2020, Pukul: 12:42).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam membantu setiap proses pemenangan Ibu Khofifah dan Emil di Pilgub Jatim 2018 dengan memberikan sumbangsih berupa barang yang berwujud payung dengan jumlah 3.750 pada tanggal 9 Mei 2018 dengan dihitung secara materil berjumlah Rp. 75.000.000,00 dengan bukti register 027/KAMIL/V/2018.[114]

Kelima, H Umi Muntafiah, M.Pd.i beliau merupakan seorang pengajar yang memiliki profesi sebagai Koordinator Pembina lomba siswa di SMP Khadijah Surabaya,[115] juga memberikan bantuan kepada Ibu Khofifah dan Emil di Pilgub Jatim 2018 yakni memberikan berupa barang yang berwujud Jilbab dengan jumlah 5.000 pada tanggal 14 Mei 2018 dengan hitungan secara materil Rp. 75.000.000,00 dengan bukti register 030/KAMIL/V/2018.[116]

Keenam, Suhadi, S.Pd.i, merupakan seorang birokrat yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah SD Khadijah Pandegiling,[117] yang juga memberikan sumbangsih kepada Ibu Khofifah dan Emil di kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 periode 2019-2023 dengan bantuan berupa barang elektronik seperti kipas angin dengan jumlah 25.000 pada tanggal 12 Mei 2018 dengan rincian material sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan bukti register 029/KAMIL/V/2018.[118]

Menurut Gordon Tullock ada beberapa faktor keterlibatan pengusaha dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Provinsi Jawa Timur 2018 tentang konsep *rent seeking* sebagai tolak ukur

---

[114] Ibid.
[115] Ibid.
[116] Ibid.
[117] http://www.khadijah.or.id/kepala-sekolah-khadijah-laporkan-kinerja-dan-prestasi-sekolah-part-ii/, (pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul: 14:07).
[118] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melihat faktor pendorong partisipasi politik pengusaha di dalam setiap proses perhelatan pemilu khususnya di Provinsi Jawa Timur diantaranya sebagai berikut.

a. Welfare Cost

Welfare Cost atau dapat disebut sebagai tarif atau harga komoditas. Yaitu merupakan sumber daya yang dikeluarkan oleh baik yang berprofesi sebagai pengusaha, birokrasi, pimpinan partai politik, partai pengusung, kader partai politik, tim sukses, tim khusus, dan relawan pemenangan dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018. Dalam setiap proses pemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak banyak disokong oleh kekuatan-kekuatan besar diantaranya yaitu berprofesi sebagai pengusaha, birokrasi, pimpinan partai politik, partai pengusung, tim sukses, tim khusus, kader partai politik hingga sampai relawan pemenangan juga ikut berperan dalam memberikan tarif komoditas baik berupa barang, jasa, sampai finansial hanya untuk agar Khofifah dan Emil menang dalam kontestasi Pilkada Jatim 2018, hal-hal yang sudah saya berikan selama proses Pilkada Jatim 2018 berlangsung yaitu diantaranya membantu sosialisasi, membantu dalam segi finansial, serta membantu kebutuhan-kebutuhan politik lainnya. *welfare cost* secara hakikat memiliki makna yang sama dengan *transfer cost* dimana seluruh stakeholder berbondong secara serentak mengeluarkan sumber daya yang mereka miliki untuk kepentingan-kepentingan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Transfer Cost

Trnasfer Cost adalah sumber daya yang sudah dikeluarkan oleh setiap stakeholder-stakholder pemenangan baik yang berprofesi sebagai pengusaha, pimpinan partai politik, tim sukses, tim khusu, kader partai politik dan relawan yang juga banyak berperan aktif di dalam setiap proses pemenangan Ibu Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018 dengan memberikan sumber daya yang mereka miliki baik berupa barang, jasa, finansial, maupun dukungan politik ketika proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018 berlangsung. Hal demikian tertuang didalam Data Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LPSDK) Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, yang mana setiap prosesi pemenangan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak tidak hanya melibatkan seorang pengusaha saja, melainkan banyak melibatkan aktor-aktor lain yang juga memiliki peran yang sama di dalam membantu beliau untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya di Provinsi Jawa Timur agar kandidat politik yang mereka dukung dapat duduk di puncak kekuasaan supaya setiap kepentingan yang mereka bawa dapat terhimpun dengan baik sebagian dari aktor-aktor tersebut ialah sebagaimana disebutkan di dalam tabel berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 1.2

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Kepada Calon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak

Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018

NO.	Tanggal	Jumalah Sumbangan		Bentuk Sumbangan		Asal Sumbangan	Profesi Asal Sumbangan	Bukti Register Sumbangan
		(Rp)	Unit	Uang	Barang			
1	26/02/2018	50.000.000,00		V		Renville Antonio, SH, M.H	> Sekertaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur	006/KAMIL/II/2018
							> Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur	
2	10/3/2018	73.500.000	3,500.00		V	Drs. Masnuh, MA	> Ketua Tim Pemenangan Khofifah dan Emil wilayah Kabupaten Sidoarjo	008/KAMIL/III/2018
							> Direktur Utama PT. Masrur and Son di bidang usaha tiang listrik	
3	18/04/2018	70.000.000	4,000.00		V	Rachmad Rudiyanto	> Dewan Penasihat Gerakan BangBang Wetan	023/KAMIL/IV/2018
							> Pengusaha Percetakan di Lidah Kulon Surabaya	
4	9/5/2018	75.000.000	3,750.00		V	Rif'ah Nuroniyah	> Kepala Sekolah SMP Khadijah Surabaya	027/KAMIL/V/2018
5	14/05/2018	75.000.000	5,000.00		V	Umi Muntafi'ah, M.Pd.i	> Tenaga pengajar yang berprofesi sebagai koordinator pembina lomba siswa di SMP Khadijah Surabaya	030/KAMIL/V/2018
6	12/5/2018	75.000.000	25,000.00		V	Suhadi, S.Pd.i	> Kepala Sekolah SD Khadijah Pandegiling Surabaya	029/KAMIL/V/2018

Data Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Arsip KPU Provinsi Jawa Timur.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku *rent seeking* tidak hanya melibatkan seseorang yang memiliki sumber daya besar untuk terlibat aktif di dunia politik, tetapi dengan menggunakan kekuasaan seseorang pun juga mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk masuk di dunia politik khususnya dalam proses pemenangan Ibu Khofifah dan Emil di kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018. Sehingga hal ini menjadi nampak jelas bahwa di dalam proses pemenangan beliau tidak hanya melibatkan seorang pengusaha saja, melainkan juga melibatkan para aktor-aktor lain seperti pejabat publik, birokrat, dan kader partai politik juga bersama-sama mengambil perannya masing-masing dengan memberikan bantuan sumber daya baik berupa material, barang, maupun jasa pada setiap proses pemenangan Ibu Khofifah dan Emil di Pilgub Jatim 2018 dengan tujuan agar segala kepentingan yang mereka miliki dapat terwujud secara maksimal, sebab dalam dunia politik tidak mengenal kawan, sahabat, maupun lawan, tetapi semua berdasarkan kepentingan.

c. Competing Rents

Competing Rents adalah alat bagi setiap stakeholder-stakholder untuk melakukan proses loby politik kepada calon yang sudah mereka bantu di dalam proses pemenangan di Pilkada Jatim 2018, calon yang dimaksud disini yaitu ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang merupakan salah satu calon yang di dukung oleh berbagai profesi seperti pengusaha, birokrasi, tim sukses, tim khusus, pimpinan partai politik, kader partai politik serta segenap relawan pemenangan yang sudah banyak berperan dalam setiap proses pemenangan sebagai jembatan untuk membawa kepentingan-kepentingan mereka khususnya dibidang usaha seperti perijinan, distribusi, kouta impor, dan bantuan lainnya yang dapat menguntungkan bagi dunia usaha serta keuntungan-keuntungan politik lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bpk. TH selaku pengusaha sekaligus Ketua Progo Jawa Timur dalam proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018 yang menyatakan bahwa:

"...yang berkaitan dengan loby politik maupun bisnis merupakan hal yang wajar setelah pemimpin yang kita support menang dalam kontestasi pemilihan, sebab dalam hal ini saya selaku pengusaha juga sudah banyak andil dalam membantu setiap proses pemenangan Khofifah dan Emil di Pilkada Jatim 2018 baik dalam bentuk barang, jasa, maupun finansial ratusan juta rupiah agar supaya saya dan bisnis yang saya geluti mendapatkan akses yang mudah khususnya dibidang perijinan".[119]

Hal yang sama juga diungkapakan oleh Bpk.Dedy Prasetyo selaku sekertaris DPC Partai Demokrat Surabaya dan sekaligus sebagai pengusaha dibidang jasa yang mengatakan bahwa:

"...keterlibatan saya dalam proses pemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018 selain merupakan perintah dari pimpinan partai politik, saya dalam hal ini juga terlibat karena saya memiliki kepentingan diantaranya yaitu supaya saya diberikan akses seluas-luasnya untuk mempengaruhi pembuatan-pembuatan aturan yang melibatkan urusan-urusan dunia usaha seperti perijinan, pajak, distribusi, kouta subsidi dan kebutuhan lainnya. Selain itu, saya juga ingin agar perkembangan dunia usaha saya yang beroperasi di Jawa Timur tetap berjalan sesuai dengan harapan-harapan pengusaha lainnya. dan

[119] Bpk. TH., Wawancara Oleh Penulis., (Pada 06 Februari 2020, Pukul: 16:46)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alhamdulillah ibu Khofifah dan Emil Dardak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, serta saya Bersama Bpk. Priyono mendapatkan mandat secara langsung dari ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk dilibatkan secara Bersama-sama mensukseskan pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/230/KPTS/013/2019 yakni Tentang Tim Fasilitas Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Jawa Timur".[120]

Hal serupa juga dibenarkan oleh Bpk. Priyono selaku pengusaha sekaligus konsultan dibidang ekonomi dalam pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018 yang mengatakan bahwa:

"...keterlibatan saya dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim yaa tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan Bpk. Dedy yang jelas untuk perkembangan dunia usaha saya di Jawa Timur agar diberikan kemudahan akses dalam bidang perijinan, pajak, distribusi dll, sebab ini semua adalah produk politik, sehingga suka tidak suka pengusaha seperti saya dan yang lainnya pasti melakukan hal yang sama untuk kemajuan dunia usahanya dengan melibatkan diri dalam

[120] Bpk. Dedy Prasetyo., Wawancara Oleh Penulis, (14 Februari 2020 Pukul: 10:20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018. Dan alhamdulillah ibu Khofifah dan Emil Dardak terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, selain saya bahagia atas kemenangan beliau saya diberikan amanat langsung oleh ibu Khofifah untuk dilibatkan didalam proses pembangunan insfrastruktur yang ada di Jawa Timur sesuai dengan arahan Bpk. Presiden Joko Widodo yakni Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/230/KPTS/013/2019 yakni Tentang Tim Fasilitas Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Jawa Timur".[121]

Pendapat serupa juga dibenarkan oleh Bpk. DK selaku pengusaha sekaligus salah satu tim pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018 yang menyatakan bahwa:

"…didalam politik tidak ada yang namanya tidak memiliki kepentingan, semua pihak memiliki kepentingan apalagi saya yang berprofesi sebagai pengusaha yang juga terlibat aktif dalam proses pemenangan Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018. Dengan mengeluarkan sumber daya yang ada saya ikut andil dalam setiap proses pemenangan beliau dengan syarat melihat peluang kemenangan beliau pada Pilkada Jatim 2018 agar

[121] Bpk. Priyono., Wawancara Oleh Penulis, (pada 14 Februari 2020, Pukul: 11:29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang sudah kami keluarkan membawa hasil yang maksimal supaya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kami pengusaha-pengusaha bisa dilibatkan didalam membuat dan mengelola kebijakan tersebut". [122]

Ada sedikit berbeda kepentingan yang dibawa oleh setiap stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018 dari keterangan-keterangan diatas yang berprofesi sebagai pengusaha sekaligus pimpinan partai politik dengan Bpk. TM yang merupakan tim khusus pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018, sekaligus pimpinan birokrasi dibidang kesenian untuk berperan aktif didalam setiap prosesi pemenangan ibu Khofifah dan Emil di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018. Hal yang membedakan kepentingan Bpk TM dengan stakeholder-stakeholder diatas ialah sebagaimana diungkapkan oleh Bpk. TM selaku tim khusus dalam setia proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018 yang menyatakan bahwa:

"…saya terlibat didalam proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim selain saya diperintah oleh Bpk. X beserta jajaran birokrasi di pemerintahan Provinsi Jawa Timur baik dibidang Biro Hukum maupun Kesejahteraan sosial, dalam hal ini saya terlibat karena saya ada kepentingan untuk saya pribadi dalam mempertahankan jabatan saya dibidang birokrasi kesenian agar tidak diisi

[122] Bpk. DK., Wawancara Oleh Penulis, (03 Februari 2020 Pukul: 18:30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang lain, selain itu juga agar saya dapat dipermudah dalam setiap akses-akses apapun baik dalam program kegiatan kesenian maupun kegiatan-kegiatan lainnya baik yang bersifat bisnis maupun non bisnis".[123]

Hal serupa juga hampir sama dengan keterangan diatas sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Bpk. GW yang merupakan pengusaha eksportir dibidang pertanian yang menyatakan bahwa:

"...saya terlibat dalam pemenangan ibu Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018 selain karena saya diperintah langsung oleh Bpk. Presiden Joko Widodo, selain itu karena kedekatan saya dengan ibu Khofifah selama menjadi Menteri Sosial sudah sering berkolaborasi setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh ibu Khofifah khususnya kebijakan dibidang pertanian, setelah ibu Khofifah dan Emil Dardak menang dalam kontestasi Pilkada Jatim 2018, alhamdulillah lagi-lagi saya diperintah oleh ibu Khofifah dilibatkan untuk mensukseskan proyeksi pembangunan di Jawa Timur sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/230/KPTS/013/2019 yakni Tentang Tim Fasilitas Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Jawa Timur".[124]

[123] Bpk. TM., Wawancara Oleh Penulis Melalui Via Daring., (Pada 15 Mei 2020, Pukul: 18:15)
[124] Bpk. GW., Wawancara Oleh Penulis Via Daring, (Pada 12 Januari 2020, Pukul 14:29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan keterlibatannya pengusaha dalam proses pemenangan ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018, bukan karena seseorang tersebut berprofesi sebagai pengusaha, birokrasi, atau stakeholder-stakeholder yang lainnya. melainkan juga karena mereka memiliki kedekatan special dengan kandidat atau sebagai patner kerja dalam satu instansi. Selain itu pula pengusaha juga memiliki kepentingan-kepentingan lain yakni mempengaruhi keputusan politik terkait dengan perijinan, distribusi, pajak, dll untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya bagi duni usaha yang mereka geluti di Provinsi Jawa Timur, serta memiliki kepentingan untuk mempertahankan jabatan-jabatan politik yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan hal ini akan menyebabkan ketidaksetaraan sumber daya yang dimiliki oleh para elite politik dengan para stakeholder, sehingga menyebabkan para elite politik terus bergantung kepada para pemilik modal untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di bidang politik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Harrington yang dikutip oleh Jeffry A. Winters di dalam bukunya yang berjudul *"Oligarki"* yang menyatakan bahwa dimana ada ketidak setaraan sumber daya, pasti tidak akan ada kesetaraan kekuasaan dan dimana ada ketidaksetaraan kekuasaan, maka tidak mungkin ada kesejahteraan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika cost politik semakin tinggi yang dikeluarkan oleh kontestan pemilu, maka semakin banyak para pemilik modal mengusai kekuasaan, dan ketika para pemilik modal memiliki kekuasaan, maka ketika itu pula aspirasi rakyat terabaikan.[125]

[125] Jeffry A. Winters., *Oligarki*, (Jakarta: PT Gramedia Pustka Utama, 2011):. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kemunculan pengusaha dan penguasa elite politik dalam setiap proses politik merupakan sesuatu hal yang sangat rasional terjadi baik dalam proses pembuatan kebijakan, rekrutmen politik, hingga sampai dalam proses kontestasi politik. Oleh sebab itu, pengusaha dan penguasa elite politik selalu berkolaborasi satu sama lain, ini dikarenakan biaya politik yang sangat tinggi yang dikeluarkan oleh setiap kandidat politik menyebabkan para kandidat politik membutuhkan pengusaha selaku pemilik modal untuk membantu mereka baik dalam proses loby politik hingga sampai dalam proses pembiayaan politik khususnya di Pilkada Provinsi Jawa Timur. Salah satu contoh yang dapat diambil ialah seorang kandidat ibu Khofifah dan Emil Dardak yang merupakan bagian dari kandidat politik yang ikut serta dalam kontestasi politik di Provinsi Jawa Timur 2018, yang mana beliau mendapatkan banyak dukungan politik dari berbagai profesi baik dibidang usahawan, birokrasi, pimpinan partai politik, kader partai politik, hingga sampai relawan atau tim pemenangan yang juga banyak berperan aktif didalam setiap proses pemenangan beliau di Pilkada Jatim 2018. Hal seperti ini sangat tampak jelas antusias yang diberikan oleh pengusaha baik yang berprofesi sebagai birokrasi, pimpinan partai politik maupun tim pemenangan dalam membantu beliau baik berupa barang, jasa, maupun finansial menjadi salah satu kekuatan mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membantu seorang kandidat politik ikut serta di dalam Pilkada Jatim 2018. Maka partisipasi politik pengusaha dalam setiap proses pemenangan ibu Khofifah dan Emil Dardak di Provinsi Jawa Timur 2018, bukan karena mereka memiliki kedekatan erat dalam dunia bisnis dengan seorang kandidat, melainkan karena mereka beranggapan bahwa setiap kebijakan politik selalu berpengaruh terhadap dunia usaha.

2. Salah satu faktor penyebab keterlibatannya pengusaha dalam proses politik ini disebabkan karena berbicara soal kebijakan politik juga membahas soal perijinan, distribusi, pajak, dll yang mana kebijakan seperti ini sangat erat dengan perkembangan dunia usaha, sehingga suka atau tidak suka kebijakan inilah yang melatarbelakangi mereka sebagai pengusaha terlibat aktif didalam dunia politik, sebab dengan keterlibatannya mereka didalam dunia politik dapat memberikan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan yang saat ini mereka geluti khususnya di Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa partisipasi politik pengusaha dan penguasa elite politik diibaratkan dua sayap merpati yang mana salah satu diantaranya sama-sama memiliki peran yang sangat penting didalam setiap proses politik baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, ini dikarenakan setiap proses politik merupakan bagian penting dalam proses dunia usaha khususnya di Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bungin, Burhan. 2003.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, Jhon W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Design Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan,* (Terj) *Qualitativ Inquairy & Research Design: Choosing Among Five Appoaches Third Edition.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Caporaso, James A &Levine, David P. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winters, Jeffry A. 2011. *Oligarki*., Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Fahri. 2007. *Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat*., Perpustakaan Nasional RI: Yayasan Faham Indonesia.

Hamzah, Fahri. 2012. *Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*., Jakarta: Yayasan Faham Indonesia.

Halim, Abd.2018. *Politik Lokal: Aktor, Problem, Konflik Dalam Arus Demokratisasi.* Malang: *Intrans Publishing.*

Hudiyanto.2008. *Ekonomi Politik.*Jakarta: PT Bumi Aksara.

Marham, Idrus. 2016. *Ironi Demokrasi Setengah Hati: Studi Kasus Kontestasi Elite Politik di DPR RI 1999-2004.* Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: ALFABETA.

Surbakti. Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Grasindo.

Wardani, Aprilia Fitria&Findi, Muhammad. 2019. *Ekonomi Politik: Pemburu Rente*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Heryanto, Gun Gun. 2019. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi.* Padang: UNP Press Padang.

Naafisah, Didah., dan Mufti, Muslim. 2013. *Teori-Teori Demokrasi.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI). 2017. *Indonesia Tahun 2030: Ide dan Gagasan Ekonomi Muda FEB UI*. Jakarta: PT Gramedia.

Wilson, Ian Douglas. 2018. *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan Di Indonesia Pasca Orde Baru.* Tanggerang Selatan: CV Marjin Kiri.

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Suparlan, Parsudi., dan Lohanda, Mona., Dkk. 2002. *Antara Prasangka dan Realita: Telaah Kritis Wacana Anti China Di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Inspirasi.

Sanit, Arbit. 1997. *Partai, Pemilu, dan Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halevy., dan Etzioni, Eva. 2011. *Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik.* Yokyakarta: Asram Foundation.

Jurnal:

Arifudin. "Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kedaulatan Rakyat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017"*Jurnal Bawaslu*. Volume. 03 Nomor.03, Tahun 2017.

As'ad, M. Uhaib. "Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik: Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan" *Jurnal As Siyasah*. Volume.01 Nomor 01 (2016).FISIP:Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin, Email: uhaibn@yahoo.com.

Asriyadi, Dadang."Praktek Demokratisasi Oleh Pengusaha Dalam Perspektif Rent Seeking Behaviour" *Jurnal Mimbar Administrasi. FISIP UNTAG Semarang*.Volume.15 Nomor 19 (2019).

Azhar, Muhammad Ali."Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha Jadi Penguasa" *Jurnal Publica*. Dosen Fisip Universitas Udayana.Volume 02 Nomor 01(2012).

Hajad, Vellayati. "Oligark Sebagai Rent Seeker: Haruskah? "*Jurnal Public Policy*.Volume.03 Nomor.01 (2017). Universitas Teuku Umar, Email: Vellayati.Hajad@gmail.com.

Harsono, Priyanto. "Bisnis Sebagai Kekuatan Politik: Kajian Pengembangan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengembangan Industri Pariwisata (2005-2012)" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume.01 Nomor.02, September (2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purwoko. “Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi” *Jurnal Ilmu Politik.* Volume. 01 Nomor. 01, April 2010.

Umamah, Nurul., Na’im, Mohammad., dan Iffatun Nisa, Noviah. *“Strategy Of Golongan Karya To Be Winner In Election Year 1971-1997” History Education,* Program Jember, *University. Jurnal Historica.* Volume. 01 Nomor. 01. 2017.

Masitho, Beby. “Dinamika Politik Pembangunan Pada Masa Orde Baru: Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peran Modal Jepang”, Universitas Medan Area, Jl. Kolam No. 01 Medan Estate, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL, Email: politikbeby@yahoo.co.id., *Jurnal Perspektif.* Volume. 06 Nomor. 02, Oktober 2013.

Ma’arif, Syamsul. “Kegagalan Privatisasi BUMN Di Era Orde Baru”, Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP UNILA, *Jurnal Administrasi Publik.* Volume. 09 Nomor. 01, 2018.

Syuf’at. “Demokrasi Ekonomi Di Indonesia Era Reformasi”, Dosen Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, *Jurnal el-JIZYA.* Volume. 02 Nomor. 01, Januari-Juni 2014.

Manulang, Erifan. “Parameter Pemilu Demokratik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017: Tinjauan Aspek Persaingan Yang Bebas dan Adil” *Jurnal Bawaslu.*Volume.03 Nomor 03 (2017). Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu, Universitas Airlangga, KPU Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Email: emanullang@gmail.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masriadi. “Perselingkuhan Penguasa dan Pengusaha Terhadap Perampasan Hak Publik” *Jurnal CIVICUS.* Email: patu.masriadi@yahoo.com,, Volume. 20 Nomor. 02, Desember (2016).

Muhaimin, Yahya. “Hubungan Penguasa-Pengusaha: Dimensi Politik Ekonomi Pengusaha Klien Di Indonesia” *Jurnal Kelola*, No 10/IV/1995.

Nugraha, Fajar Kuala. “Pemilukada: Menguatnya Politik Oligark Lombok Timur Tahun 2013” *Journal Of Governance.* Volume.01 Nomor.02(2014).

Saleh, Muhammad Didit&Perdana, Aditya. “Praktik Rent Seeking dan Relasi Negara Dengan Kapital: Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel Oleh Gubernur Nur Alam Di Provinsi Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Analisis Kebijakan*, Volume. 03 Nomor.01(2019).

Sendra, I Made. “Hubungan Segitiga Antara Birokrat, Pengusaha, dan Politikus Partai Demokrasi Liberal (JIMINTO) Dalam Pemilihan Umum Di Jepang” *Jurnal Kajian Budaya*.Volume.10 Nomor. 20, Juli (2014). Fakultas Pariwisata: Universitas Udayana.

Soliha, Ratnia. “Pola Relasi Bisnis dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking” *Jurnal Wacana Politik* Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Email: ratniasolihah91@yahoo.co.id. Volume.01 Nomor.01, Maret (2016).

Simanjuntak, Novembri Yusuf. “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu” *Jurnal Bawaslu*, Magister Ilmu Politik Kosentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, Email: Zoentaksvembri@yahoo.co.id., Volume. 03 Nomor. 03, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurdin, Maharani. “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu”, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: maharanifhunsika@gmail.com, *Jurnal Veritas,* Volume. 05 Nomor 02, 2019.

Darwis, Muh. Salman. “Menakar Indepedensi Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015”, *Jurnal Etika & Pemilu,* Volume. 01 Nomor. 02, Agustus 2015.

Haryati, Dedeh. “Penguatan Peran Pawaslu Dalam Pemilukada: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Jembaran”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR-RI, Email: keyshaghinacamila@yahoo.com, *Jurnal Bina Praja,* Volume. 04 Nomor. 02, Juni 2012.

Sarman, Mukhtar. “Menakar Kualitas Pilkada: Menstrukturkan Sebuah Kontestasi Politik Yang Berintegritas”, *Jurnal Etika & Pemilu,* Volume 01 Nomor. 02, Agustus 2015.

Akbar, Idil. “Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia”, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Padjajaran, Email: idil.akbar@unpad.ac.id, *Jurnal Ilmu Pemerintahan,* Volume. 02 Nomor. 01, April 2016.

Nadir, Sakinah. “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, Email:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ina.nadirmsi2006@yahoo.com, *Jurnal Politik Profetik,* Volume. 01 Nomor. 01, Tahun 2013.

Nopyandri. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945", Perumahan Kembar Lestari Block AC No. 17 RT 36, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume. 02 Nomor. 02, Juni 2005.

Sanur, Debora. "Persiapan Pilkada Serentak 2020", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI, Gd. Nusantara 1 Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Email: infosingkat@gmail.com, *Jurnal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat,* Volume. IX Nomor. 24, Desember 2019.

Imawan Hanafi, Ridho. "Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik", Alumnus Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Email: ridhoimawan@gmail.com, *Jurnal Penelitian Politik,* Volume. 11 Nomor. 02, Desember 2014.

Yunas, Novi Setia & Isbahi, Baiqun. *"Perbandingan Loyalitas Pemilih Abangan dan Santri Terhadap Khofifah dan Saifullah Yusuf Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018"*, Departemen Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Email: novysetiayunas@gmail.com, FISIPOL Universitas Darul Ulum Jombang, Email: baiqunbai@gmail.com, *Jurnal Sosiologi Agama,* Volume. 12 Nomor. 01, Januari-Juni 2018.

Chalik, Abdul. *"Elite Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur"*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, Jl. Jendral A. Yani 117 Surabaya, Email: achalik_@yahoo.co.id, *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Volume. 23 Nomor. 02, Desember 2015.

Hilman, Yusuf Adam. *"Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur dan Arah Koalisi Pada Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018"*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jawa Timur, Email: adamhilman@umpo.ac.id, *Jurnal Wacana Politik*, Volume. 03 Nomor. 01, Maret 2018.

Saraswati, Retno., & Anwar, Muhammad. *"Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015",* KPU RI dan Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bonjol SH No. 1, Pleburan, Semarang, Email: 99tanjunganwar@gmail.com, dan saraswatiretno@yahoo.co.id, *Jurnal Yudisial*, Volume. 12 Nomor. 03, Desember 2019.

Suharyanto, Agung., *"Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah"*, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume. 02 Nomor. 02 Tahun 2014.

Herianto, Meki, Adlin. *"Partisipasi Politik Pengusaha Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014"*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Email: mex_he@gmail.com, Volume. 02 Nomor. 02 Tahun 2015.

Nur Wardhani, Primandha Sukma. *"Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum"*, Program Studi Pendidikan Pancasila dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume. 10 Nomor. 01 Tahun 2018.

Heriyono., *"Ekonomi Politik Dalam Bisnis"*, Dosen Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon, *Jurnal Ekonomi*, Volume. 01 Nomor. 02 Januari-April Tahun 2013.

Kristiyanto, Eko Noer. *"Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi di Batam"*, Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jl. H.R. Rasunan Said Kav 4-5, Kuningan Jakarta Selatan, Email: tigers_nova@yahoo.com., *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE*, Volume. 17 Nomor. 01 Maret Tahun 2017.

Eko Agus Alfianto., *"Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat"*, Dosen FISIP Universitas Yudharta Pasuruan, *Jurnal Heritage*, Volume. 01 Nomor. 02 Januari 2012.

Kuntowicaksono., *"Pengaruh Pengetahuan Wirausaha dan Kemampuan Memecahkan Masalah Ekonomi"*, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang Indonesia, *Journal Of Economic Education*, Volume. 01 Nomor. 01 2012.

Emily Nur Saidy., *"Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam"*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makasar, Email: sirajuddinroy@gmail.com., *Jurnal LAA MAISYIR*, Volume. 06 Nomor. 02 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mochammad Farisi., *"Sirkulasi Elite Politik Lokal Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Provinsi Jambi"*, Fisipol Universitas Jambi, Email: siraf_faris@yahoo.com., *Jurnal JISIP-UNJA*, Volume. 01 Nomor. 01 Juli-Desember 2017.

Suprihanto, Dodi. "Pengusaha dan Politik: Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik Sumatera Barat 1999-2009". Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Padang, 2011.

Mochammad Syafiudin., *"Politik Profetik Dalam Gerakan BangBang Wetan Surabaya"*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sumber Lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahayn Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

www.KOMPAS.com, Pada 25 Juni 2020, Pukul: 20:30

www.m.detik.com, Pada 25 Juni 2020, Pukul: 20:49

www.jatim.bps.go.id.

https://duta.co/saksi-dibayar-disuruh-mancing-h-masnuh-ujian-menuju-kemenangan-khofifah-emil, pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul: 11:58.
https://jatimnet.com/pengusaha-tiang-listrik-dukung-cak-nur-jadi-bupati-sidoarjo,

pada tanggal, 12 Agustus 2020, pukul: 11:59.

https://www.smpkhadijah.com/staff-karyawan/., pada tanggal 12 Agustus 2020,

Pukul: 12:42.

http://www.khadijah.or.id/kepala-sekolah-khadijah-laporkan-kinerja-dan-prestasi-

sekolah-part-ii/, pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul: 14:07.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id